



**LAPORAN KINERJA
AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH (LKJ IP)**



**TAHUN
2020**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberika rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun anggaran 2020.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) adalah suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi berupa hasil dari pengolahan data kegiatan-kegiatan suatu instansi, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis terhadap kinerja suatu instansi kepada pemberi delegasi, wewenang dan mandat yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntabilitas pimpinan instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 yang berisi laporan realisasi kinerja tahun 2020.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti masih ada kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan tugas kedepan.

Selatpanjang, 10 Februari 2020

PIH. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



ROSDANER, S.Pd
NIP. 19610311 198804 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | I-1 |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi | I-2 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | I-2 |
| C. Aspek Strategis Organisasi | I-3 |
| D. Isu Strategis Organisasi..... | I-4 |
| E. Struktur Organisasi..... | I-5 |
| F. Sumber Daya Manusia..... | I-8 |
| | |
| BABII. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | II-1 |
| A. Rencana Strategis Organisasi | II-1 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2020..... | II-16 |
| C. Perjanjian Kinerja | II-18 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | III-1 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | III-1 |
| B. Analisis Capaian Kinerja | III-4 |
| C. Realisasi Anggaran | III-31 |
| D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti 2019 | III-57 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP | IV-1 |
| A. Kesimpulan | IV-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan. Selain itu juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif serta perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders* pada setiap unit di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) ini sebagai gambaran capaian kinerja OPD yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada visi dan misi strategis berbasis analisis lingkungan.

Performance Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DPUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagai kontrak kinerja DPUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), yang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 34 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai :

a. Tugas:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Fungsi:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen untuk mewujudkan misi meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang serta misi meningkatkan standar kualitas lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan misi yang telah dituangkan oleh Pemerintah Daerah diatas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang telah menetapkan 3 (tiga) aspek strategis yaitu :

1. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang infrastruktur dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dibidang infrastruktur dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Ketaataan masyarakat terhadap pemanfaatan tata ruang.

D. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi penggunaan layanan, oleh karena itu perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain :

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi Daerah pada Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perbatasan, Kawasan Pulauterluar dan Kawasan Daerah tertinggal).
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum belum merata.
3. Kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih.
4. Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Tingginya kebutuhan atas ketersediaan Rumah Layak Huni.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 34 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk Dinas, merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari;

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian perencanaan dan program;
3. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari;

1. Seksi perencanaan teknis sumber daya air;
2. Seksi pembangunan sumber daya air;
3. Seksi operasi dan pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga, terdiri dari;

1. Seksi perencanaan teknis binamarga;
2. Seksi pembangunan jalan dan jembatan;
3. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.

e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari;

1. Seksi perencanaan teknis tata ruang;
2. Seksi pemanfaatan ruang;
3. Seksi pengendalian pemanfaatan ruang.

f. Bidang Cipta Karya Dan Jasa Konstruksi, terdiri dari;

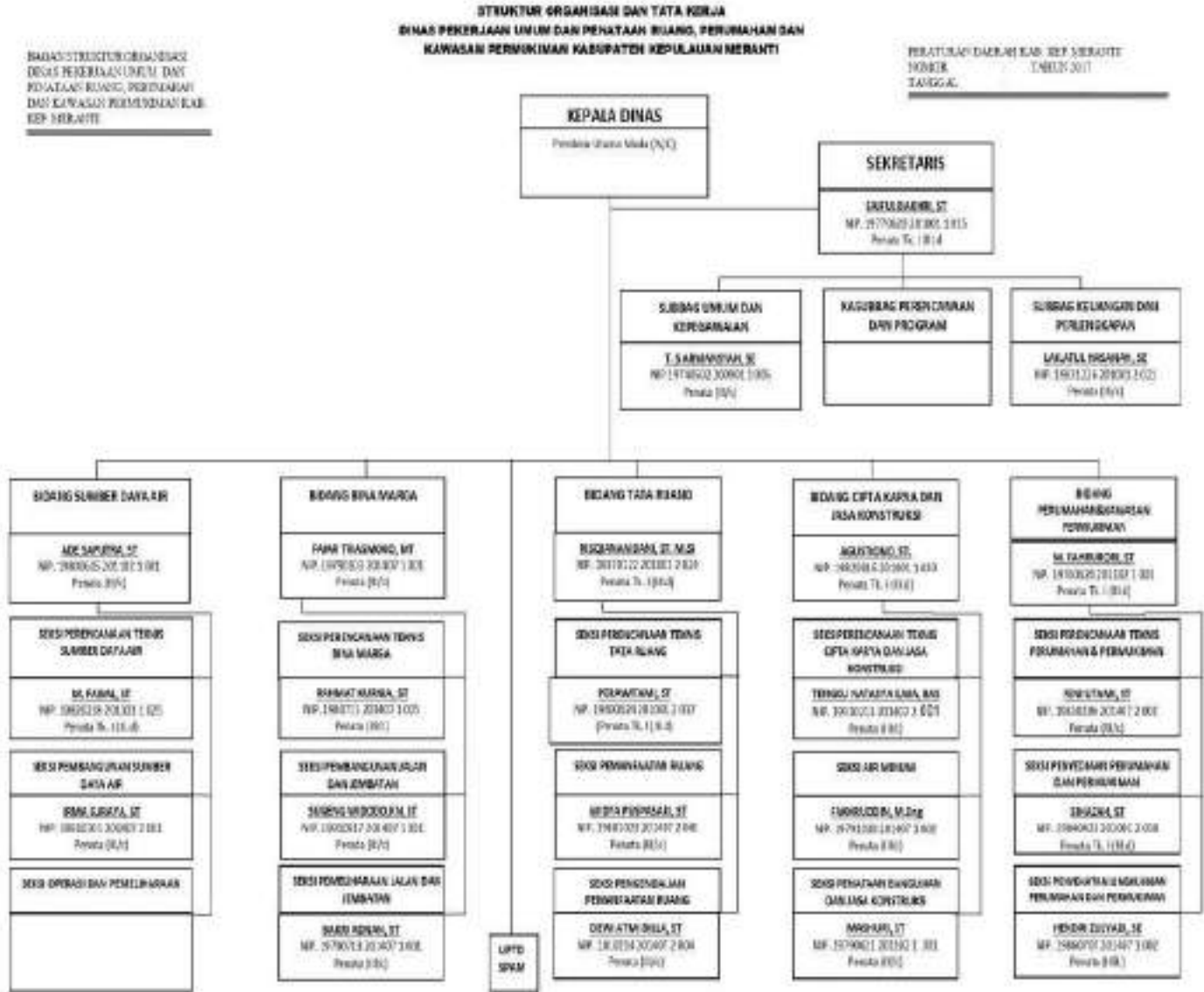
1. Seksi perencanaan teknis cipta karya dan jasa konstruksi;
2. Seksi air minum;
3. Seksi penataan bangunan dan jasa konstruksi.

g. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, terdiri dari;

1. Seksi perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
2. Seksi penyediaan perumahan dan permukiman;
3. Seksi penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman.

h. Unit pelaksana teknis dinas;

Gambar 1.1: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020



Sumber Data : Data DUK PUPRPKP 2020

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh **62** orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan **169** orang Tenaga Harian Sukerela. Dalam tabel berikut akan digambarkan perbandingan Aparatur/Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tabel 1.1: Jumlah Data Pegawai dan Honorer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

| NO | JABATAN | JUMLAH | |
|---------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Esselon II.b | | Orang |
| 2 | Esselon III.a | 1 | Orang |
| 3 | Esselon III.b | 5 | Orang |
| 4 | Esselon IV.a | 17 | Orang |
| 5 | Esselon IV.b | 1 | Orang |
| 6 | Fungsional Tertentu | - | Orang |
| 7 | Fungsional Umum | 9 | Orang |
| 8 | Pelaksana | 29 | Orang |
| 9 | Tenaga Harian Lepas | 38 | Orang |
| 10 | Tenaga Harian Sukerela | 131 | Orang |
| Jumlah | | 231 | Orang |

Sumber Data : Data DUK PUPRPKP Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kepulauan Meranti yang berisi visi, misi dan strategi kebijakan yang didasarkan kepada situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan yang ada serta permasalahan dibidang Pekerjaan Umum.

1. Tujuan

Dalam menjalankan tupoksi dan merealisasikan visi misi Kabupaten Kepulauan Meranti maka ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur dasar pekerjaan umum
2. Meningkatkan luas cakupan pelayanan air bersih
3. Meningkatnya sarana permukiman masyarakat yang layak huni
4. Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
5. Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Meningkatnya infrastruktur dasar pekerjaan umum
2. Meningkatnya luas cakupan pelayanan air bersih
3. Meningkatnya ketersediaanya rumah layak huni (RLH)
4. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
5. Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2020 menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dijadikan sebagai bahan dasar penilain tingkat keberhasilan kinerja pada tahun 2020 dan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran target kinerja dinas.

Dalam upaya melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan indikator kinerja, baik indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah tujuan maupun untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah tujuan. Indikator tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1: Indikator Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD |
|-----|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 100.00 |
| 2 | Meningkatkan Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0.72 |
| 3 | Meningkatkan sarana pemukiman masyarakat yang layak huni | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 100.00 |
| 4 | Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 100.00 |
| 5 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | A |

Sedangkan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dari saran-saran yang ingin dicapai yaitu, sebagai berikut :

Tabel 2.2: Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------------|-----------------|

| | | | Pada Akhir Priode RPJMD (%) |
|---|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 100.00 |
| 2 | Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0.72 |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 100.00 |
| 4 | Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 100.00 |
| 5 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | A |

Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja Utama dan target capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target Kinerja (%) |
|-----|---|---|---|--------------------|
| | | | | 2020 |
| 1 | Meningkatkan infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 84.76 |
| 2 | Meningkatkan Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0.6 |
| 3 | Meningkatkan sarana pemukiman masyarakat yang layak huni | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 79.70 |
| 4 | Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 100.00 |
| 5 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | A |

4. Strategi dan Kebijakan

Menjawab isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman maka perlu disusun strategi dan kebijakan agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Strategi dan kebijakan yang telah

ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan sebagai berikut :

- Letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi Daerah pada Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perbatasan, Daerah tertinggal, dan Pulau terluar).

Strategi :

- ❖ Pendekatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
- ❖ Meningkatkan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal.

Kebijakan :

- ❖ Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal.
 - ❖ Menetapkan program pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
- Pembangunan Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum belum merata.

Strategi :

- ❖ Pengelolaan data infrastruktur dasar pekerjaan umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- ❖ Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- ❖ Meningkatkan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah.
- ❖ Mengembangkan basis data pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kebijakan :

- ❖ Menyusun pembentukkan pengelolaan basis data pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - ❖ Menetapkan Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar pekerjaan umum.
 - ❖ Menetapkan pembanguan infrastruktur dasar pekerjaan umum sebagai skala prioritas pembangunan.
- Kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih.

Strategi :

- ❖ Pengelolaan data infrastruktur kebutuhan ketersediaan air bersih Kabupaten Kepulauan Meranti.
- ❖ Pengembangan sumber daya air dititik beratkan pada skala prioritas dan pengelolaan sungai dan konfersi sumber daya air.
- ❖ Mengembangkan dan membangun sistem prasarana pengolahan air minum dan sistem jaringan distribusi air bersih.
- ❖ Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur air bersih.

Kebijakan :

- ❖ Metetapkan zonasi prioritas pembangunan peningkatan kualitas dan ketersediaan air bersih.
 - ❖ Penyusunan program kegiatan pembanungan infrastruktur dan pengolahan air bersih.
 - ❖ Penetapan program kegiatan sistem jaringan distribusi air bersih.
 - ❖ Mendorong pembangunan infrastruktur pemenuhan ketersediaan air bersih menjadi skala prioritas daerah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Strategi :

- ❖ Merencanakan dan melakukan pemanfaatan tata ruang, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- ❖ Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penerbitan perijinan pembangunan.
- ❖ Peningkatan pengawasan pelaksanaan perijinan membangun.

Kebijakan :

- ❖ Survey dan monitoring bangunan gedung ber-IMB
 - ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
 - ❖ Penyusunan program kegiatan penunjang pemanfaatan tata ruang wilayah
 - ❖ Mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
- Tingginya kebutuhan atas ketersediaan Rumah Layak Huni.

Strategi :

- ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dasar permukiman kabupaten kepulauan meranti

- ❖ Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin.
- ❖ Penataan dan rehabilitasi kawasan kumuh.

Kebijakan :

- ❖ Menetapkan Program Pengembangan Perumahan.
- ❖ Menetapkan Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- ❖ Menetapkan target Program kegiatan atas kebutuhan ketersediaan rumah layak huni tuntas.

5. Program/Kegiatan

Rencana kinerja dan rencana anggaran tahun 2020 memuat disusun didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman . Berikut adalah rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020:

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Anggaran

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|----------|---|----------------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3,513,986,523 |
| 1 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 784,751,523 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 2,332,800,000 |
| 3 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | 396,435,000 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,343,085,140 |
| 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 75,000,000 |
| 2 | Pengadaan Mebeleur | 71,000,000 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 87,065,140 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 9,000,000 |
| 5 | Pembangunan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor | 1,101,020,000 |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100,000,000 |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | 100,000,000 |
| 4 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 444,757,500 |
| 1 | Pembangunan Jembatan Sungai Tohor Kiri Kanan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | 444,757,500 |
| 5 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 179,513,000 |
| 1 | Pembangunan Drainase Kecamatan Tebing Tinggi | 174,893,000 |

| NO Program dan Kegiatan | | Anggaran |
|----------------------------|--|---------------|
| 5 | Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Tanah Merah | 54,800,000 |
| 6 | Pembangunan IPA Kapasitas 5L/d SPAM Gemala Sari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | 154,190,000 |
| 7 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanah Merah Kawasan Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | 1,007,590,000 |
| 8 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bungur Kawasan Desa Bungur Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | 509,425,000 |
| 9 | Perencanaan/DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Kabupaten Kepulauan Meranti | 162,490,000 |
| 10 | Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Pulau Rangsang | 110,580,000 |
| 11 | Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Pulau Merbau | 81,380,000 |
| 12 | Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Pulau Tebing Tinggi | 72,500,000 |
| 13 | Pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) SPAM Gemala Sari Kecamatan Rangsang | 39,990,000 |

| NO | | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|-----------|----|---|------------------------|
| 10 | | Program pengendalian banjir | 193,600,000 |
| | 1 | Pembangunan Pengendali Banjir Kecamatan Tebing Tinggi | 193,600,000 |
| 11 | | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | 4,111,526,000 |
| | 1 | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Dana Pendamping APBN | 57,453,000 |
| | 2 | Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca Pamsimas Kategori Hijau) (DAK Penugasan) | 4,054,073,000 |
| 12 | | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 189,621,391,998 |
| | 1 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi | 287,547,000 |
| | 2 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Barat | 131,450,000 |
| | 3 | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang | 26,707,381,582 |
| | 4 | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Barat | 18,971,353,227 |
| | 5 | Peningkatan Jalan Kecamatan Merbau | 3,844,654,000 |
| | 6 | Peningkatan Jalan Kecamatan Pulau Merbau | 10,478,878,000 |
| | 7 | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Pesisir | 13,469,398,243 |
| | 8 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tasik Putri Puyu | 1,917,764,230 |
| | 9 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | 10,422,065,400 |
| | 10 | Peningkatan Jalan Parit Gantung Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) | 215,104,228 |
| | 11 | Peningkatan Jalan Utama Kampung Tengah Desa Sungai Gayung Kiri - Jalan Api Api Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang - Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) | 84,898,000 |

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|----|---|----------------|
| 12 | Peningkatan Jalan Pelabuhan Desa Topang Kecamatan Rangsang | 73,304,000 |
| 13 | Peningkatan Jalan Pemuda Setia (DAK REGULER) | 3,131,328,539 |
| 14 | Peningkatan Jalan Pusaka Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi | 10,010,000 |
| 15 | Peningkatan Jalan Alai-Mekong (DAK IPD) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | 3,843,481,761 |
| 16 | Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | 2,646,240,300 |
| 17 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | 5,563,818,037 |
| 18 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | 22,833,253,465 |
| 19 | Peningkatan Jalan Sei. Nyiur - Perumbi | 2,017,063,071 |
| 20 | Peningkatan Jalan Alai - Mekong (DAK IPD) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Alai - Mekong Tahun 2016) | 152,778,680 |
| 21 | Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak Tahun 2016) | 147,593,160 |
| 22 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) | 180,463,042 |
| 23 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran Perencanaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) | 49,990,000 |
| 24 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) | 50,018,868 |
| 25 | Peningkatan Jalan Sumber Sari Gg. Swadaya Kecamatan Tebing Tinggi | 5,950,000 |

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|----|---|----------------|
| 26 | Peningkatan Jalan Manggis Gg. Kelapa Kecamatan Tebing Tinggi | 9,950,000 |
| 27 | Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas Kayu Ara (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | 8,172,192,116 |
| 28 | Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas - Kayu Ara (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas - Kayu Ara Tahun 2016) | 372,612,966 |
| 29 | Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran 2017) | 650,056,000 |
| 30 | Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak Tahun 2017) | 34,430,000 |
| 31 | Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran Perencanaan Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak Tahun 2017) | 49,940,000 |
| 32 | Peningkatan Jalan Banglas Gg Amal Kelurahan Selatpanjang Timur | 1,950,000 |
| 33 | Peningkatan Jalan Banglas Gg. Kuantan Selatpanjang Timur | 4,850,000 |
| 34 | Peningkatan Jalan Tanjung Samak - Repan (DAK Penugasan) | 15,578,536,198 |
| 35 | Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor (DAK Reguler) | 25,810,243,000 |
| 36 | Peningkatan Jalan Imam Bonjol Desa Citra Damai Menuju Desa Tanjung Medang (DAK Afirmasi) | 4,584,894,000 |
| 37 | Perencanaan Teknis Jalan Sei. Tohor - Tanjung Sari | 92,936,000 |
| 38 | Perencanaan Teknis Jalan Tanjung Sari - Tanjung Gadai | 92,936,000 |
| 39 | Survey Kondisi Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Th. 2019 | 39,578,000 |

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|----|---|-------------|
| 40 | Survey Kondisi Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Th. 2019 | 34,782,000 |
| 41 | Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Th. 2019 | 34,782,000 |
| 42 | Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Barat Th. 2019 | 36,861,000 |
| 43 | Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Pesisir Th. 2019 | 34,716,000 |
| 44 | Survey Kondisi Jalan Kec. Pulau Merbau Th. 2019 | 35,112,000 |
| 45 | Survey Kondisi Jalan Kec. Merbau Th. 2019 | 35,112,000 |
| 46 | Survey Kondisi Jalan Kec. Tasik Putri Puyu Th. 2019 | 34,386,000 |
| 47 | Peningkatan Jalan Pramuka Gg. Babussalam Kelurahan Selatpanjang Timur | 8,459,000 |
| 48 | DED Peningkatan Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu | 95,330,000 |
| 49 | Peningkatan Jalan Budaya Gg. Sabar Kelurahan Selatpanjang Timur | 7,942,000 |
| 50 | Peningkatan Jalan Pramuka Gg. Laksmana Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi | 11,946,000 |
| 51 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi | 989,600,000 |
| 52 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | 403,900,000 |
| 53 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi Timur | 101,400,000 |
| 54 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang | 908,000,000 |
| 55 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang Barat | 303,100,000 |

| NO | | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|-----------|----|--|---------------|
| | 56 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang Pesisir | 605,600,000 |
| | 57 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Merbau | 101,400,000 |
| | 58 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Pulau Merbau | 303,100,000 |
| | 59 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tasik Putri Puyu | 101,400,000 |
| | 60 | Peningkatan Jalan Perjuangan Kecamatan Tebing Tinggi (Penyelesaian Pembayaran 2019) | 421,153,358 |
| | 61 | Peningkatan Jalan M. Yakub - Insit Laut Kecamatan Tebing Tinggi Barat (Penyelesaian Pembayaran 2019) | 1,073,084,986 |
| | 62 | Peningkatan jalan H.Abd Kasan Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) (Penyelesaian Pembayaran 2019) | 377,734,541 |
| | 63 | Survey Kondisi Jalan Kabupaten Kepulauan Meranti | 831,600,000 |
| 13 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan | 977,111,480 |
| | 1 | Pembangunan Astaka MTQ | 26,476,480 |
| | 2 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang Barat | 98,020,000 |
| | 3 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang | 91,545,000 |
| | 4 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang Pesisir | 46,120,000 |
| | 5 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Pulau Merbau | 68,960,000 |
| | 6 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Merbau | 68,600,000 |
| | 7 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi | 186,614,000 |

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|-----------|---|----------------------|
| 8 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | 87,246,000 |
| 9 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat | 274,410,000 |
| 10 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tasik Putri Puyu | 29,120,000 |
| 14 | Program Perencanaan Tata Ruang | 76,646,500 |
| 1 | Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Selatpanjang | 76,646,500 |
| 15 | Program Pemanfaatan Ruang | 458,289,000 |
| 1 | Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang | 266,509,000 |
| 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten | 62,700,000 |
| 3 | Pendataan Bangunan Gedung di Kab. Kep. Meranti | 129,080,000 |
| 16 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 64,200,000 |
| 1 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan Ruang | 64,200,000 |
| 17 | Program Pengembangan Perumahan | 5,557,532,400 |
| 1 | Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Tebing Tinggi | 130,000,000 |
| 2 | Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | 756,000 |
| 3 | Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya, Termasuk Upah Tukang (DAK Afirmasi) | 3,178,222,400 |
| 4 | Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya, Termasuk Upah Tukang (DAK Afirmasi) | 2,248,554,000 |
| 18 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 9,606,645,027 |
| 1 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Afirmasi) | 1,506,210,000 |

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|-----------|---|---------------------------|
| 2 | Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK (DAK Afirmasi) | 2,208,345,000 |
| 3 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Penugasan) | 721,695,032 |
| 4 | Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) (DAK Penugasan) | 2,498,150,000 |
| 5 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Reguler) | 2,672,244,995 |
| 19 | Program kegiatan pemberdayaan komunitas permukiman | 200,000,000 |
| 1 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) | 200,000,000 |
| 20 | Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air | 976,578,900 |
| 1 | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Padang (DR) | 293,218,200 |
| 2 | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Rangsang (DR) | 390,142,500 |
| 3 | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Merbau (DR) | 293,218,200 |
| 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 250,000,000 |
| 1 | Pendataan Kebijakan Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti | 250,000,000 |
| | TOTAL | 228,502,614,915.22 |

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Didalam proses perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan.

Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Untuk merealisasikan rencana kinerja tersebut harus didasarkan pada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti masing-masing dikembangkan dengan dasar penilaian yang disebut indikator kinerja dari Tabel 2.4:

Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja Pada Awal Priode (%) | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Meningkatkan infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 23.09 | 28.22 | 38.24 | 52.42 | 69.81 | 84.76 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Meningkatkan Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.72 |
| 3 | Meningkatkan sarana pemukiman masyarakat yang layak huni | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 0 | 0 | 7.16 | 30.64 | 54.69 | 79.70 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 28.63 | 40.53 | 44.35 | 58.17 | 75.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A |

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam Rensta tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana terlampir pada Lampiran I : Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Berkaitan dengan cara mengukur tingkat realiasi kinerja, formulasi cara mengukur capaian kinerja yang ditetapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama dirumuskan seperti Lampiran II : Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mencakup penetapan indikator kerja dan penetapan capaian indikator kerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Mengumpulkan dan mengolah data hasil kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2019, merupakan langkah awal dalam penilaian indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya manfaat dan efektifitas. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup;

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target Kinerja (%) |
|-----|---|---|---|--------------------|
| | | | | 2020 |
| 1 | Meningkatkan infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 84.76 |
| 2 | Meningkatkan Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0.6 |
| 3 | Meningkatkan sarana pemukiman masyarakat yang layak huni | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 79.70 |
| 4 | Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 100.00 |
| 5 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | A |

Dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Tabel 3.2 berikut dapat menggambarkan tingkat capaian terhadap indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.

Tabel 3.2: Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja 2020 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD |
|-----|---|---|--------|--|-----------|---------------------------------|---|
| | | | | 2020 | | | |
| | | | | Terhadap Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD | | | |
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persen | 84.76 | 103.32 | 121.90 | 100.00 |
| 2 | Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Persen | 0.6 | 2.14 | 365.75 | 0.72 |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | Persen | 79.70 | 73.35 | 92.03 | 100.00 |
| 4 | Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | Persen | 100.00 | 172.67 | 172.67 | 100.00 |
| 5 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | A (81.26) | B (79.78) | 98.18 | A |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun hasil dari evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I

Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum

1. Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum

Indikator persentase infrastruktur dasar pekerjaan umum merupakan indikator yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020. Komitmen dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II tahun 2020. Hasil capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.3 , sebagai berikut.

Tabel 3.3. Indikator kinerja, untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum:

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 87.44 | 84.76 | 103.32 | 100 | 15.88 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target capaian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 15.88 % dari capaian tahun 2019. Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum dihitung dengan formulasi berdasarkan SK IKU yang ditetapkan yaitu Nomor : 600 / PUPRPKP/KPTS/I/2020/035, yaitu :

$$X = \frac{X1+X2+X3}{Y}$$

Keterangan :

X = Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti

X1= Persentase Kinerja Bidang Kebinamargaan

X2= Persentase Kinerja Bidang Sumber Daya Air

X3= Persentase Kinerja Bidang Cipta Karya dan Kontruksi

Y =Jumlah Bidang yang membangun Insfrastruktur Dasar Pekerjaan Umum

Maka realisasi dari kinerja pada indikator Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Dimana,

X1 = Persentase Kinerja Bidang Kebinamargaan

= 96.69 %

X2 = Persentase Kinerja Bidang Sumber Daya Air

= 83.51 %

X3 = Persentase Kinerja Bidang Cipta Karya dan Kontruksi

= 129.76%

Maka :

$$X = \frac{X1+X2+X3}{Y}$$

$$X = \frac{96.59 \% + 83.51 \% + 129.76 \%}{3}$$

$$X = 103.32\%$$

Dalam menghitung kinerja indikator Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum, sangat dipengaruhi oleh kinerja dari X1, X2, dan X3. Berikut adalah tabel dari masing-masing unsur utama dalam menghitung kinerja indikator Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum.

➤ **Penentuan Kinerja X1 : Persentase Kinerja Bidang Kebinamargaan**

Table 3.4 Indikator kinerja, untuk Esselon III Bidang Binamarga

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|--|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan | 57.37 | 81.35 | 96.69 | 100 | 39.32 |

Kinerja Persentase Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan merupakan kinerja dari Esselon III, yaitu Kepala Bidang Bina Marga. Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Esselon III tahun 2020 adalah 81.35 %. Dan realisasi kinerja pada indicator persentase infrastruktur kebinamargaan pada tahun 2020 sebesar 96.69 %. Dengan demikian capaian kinerja Esselon III pada indicator ini untuk tahun 2020 sebesar 118.85% dari yang telah di targetkan. Hasil tersebut diukur dari target kinerja berbanding dengan realisasi kinerja. Jika dihitung angka peningkatan capaian kinerja pada indikator ini dari yang ditergetkan terhadap realisasi terdapat surplus capaian sebesar 39.32%.

Prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil kirja yang diperoleh dari kinerja Esselon IV Bidang Binamarga. Kinerja tersebut diperoleh dari akumulasi kinerja Esselon IV. Berikut adalah tabel kinerja Esselon IV Bidang Bina Marga.

Tabel 3.5 Indikator kinerja, untuk Eselon IV Bidang Binamarga

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|--|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Panjang Jalan dalam kondisi Mantab | 88.03 | 93.24 | 110.70 | 100 | 22.67 |
| Persentase Jembatan dalam kondisi baik | 29.31 | 74.14 | 29.31 | 100 | 0.00 |
| Persentase Panjang Jalan yang terpelihara | 62.86 | 87.35 | 196.62 | 100 | 133.76 |
| Persentase Pemeliharaan Jembatan | 49.31 | 70.68 | 50.13 | 100 | 0.82 |
| Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Bina Marga | 71.33 | 80.00 | 103.33 | 100 | 32.00 |

Dari tabel 3.5 diatas, diperoleh penjelasan bahwa, dalam penentuan indikator persentase pembangunan infrastruktur kebinamargaan dipengaruhi unsur-unsur dari beberapa indikaotor lain, yaitu:

a) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi Mantab

Dengan target 93.24 % dan realisasi 110.70%. Unsur utama dalam menghitung persentase tersebut diperoleh dari panjang jalan yang terbangun dalam kondisi mantab sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan target capaian panjang jalan dalam kondisi mantab pada akhir priode RPJMD yaitu tahun 2021. Panjang jalan dalam kondisi mantab sampai dengan tahun 2020 yaitu 393.56 KM. Target capaian pada akhir priode RPJMD sepanjang 355.53 KM. Capaian panjang jalan dalam kondisi mantab tersebut hasil penjumlahan capaian panjang jalan dalam kondisi mantab sampai dengan tahun 2019 yaitu dengan panjang 312.96 KM, ditambah dengan hasil pembangunan jalan dalam kondisi mantab tahun 2020 yaitu dengan panjang 80.6 KM.

Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai capain tersebut adalah besarnya anggaran pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pembangunan

jalan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Faktor lain adalah perhatian kusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya peningkatan infrastruktur jalan dengan menetapkan dalam prioritas pembangunan pada tahun 2020 di RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya anggaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembangunan jalan.

b) Persentase Jembatan dalam kondisi baik

Persentase jembatan dalam kondisi baik dengan target 74.14% dan dengan realisasi sebesar 29.31%. Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, maka pada indikator persentase jembatan dalam kondisi baik tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sebesar 44,83 % tidak dapat dipenuhi dari target yang telah ditetapkan. Nilai capain ini masih sama dengan nilai capaian tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 tidak terdapat pembangunan jembatan.

Angka persentase tersebut dihitung dari jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik sampai pada tahun 2020 dibagi dengan target jumlah jembatan yang dibangun sampai dengan akhir priode RPJMD yaitu tahun 2021. Jumlah jembatan yang dibangun sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 17 unit. Target jumlah jembatan yang dibangun sampai tahun 2021 adalah sebanyak 58 unit.

Tidak terpenuhinya capaian realisasi pada indikator persentase jembatan dalam kondisi baik disebabkan karena penetapan target capaian yang harus direalisasikan untuk setiap tahun dan sampai akhir tahun RPJMD terlalu besar. Penetapan pada awal penyusunan Renstra tidak memperhitungkan potensi dan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan demikian target yang telah ditetapkan tidak akan pernah dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

c) Persentase Panjang Jalan yang terpelihara

Persentase panjang jalan yang terpelihara dengan target 87.35% dan dengan realisasi 196.62%. Realisasi kinerja pada indikator ini jauh melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021 panjang jalan

yang di rehabilitasi sepanjang 10.000 M^2 . Sedangkan capaian realisasai sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 19.662 M^2 .

Faktor tidak dapat tercapainya target disebabkan karena perubahan kebijakan, dimana fokus pemerintah daerah adalah melakukan fokus rehabilitasi jalan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pola swakelola dan didukung dengan anggaran yang cukup besar pada sektor ini.

d) Persentase Pemeliharaan Jembatan

Persentase pemeliharaan jembatan dengan target 70.68% dan realisasi sebesar 50.13%. Secara tingkat keberhasilan capaian, hal tersebut menunjukkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebesar 20.55%. Capaian persentase tersebut diperoleh dari panjang luasan jembatan yang dilakukan pemeliharaan sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan target luasan jembatan yang dilakukan pemeliharaan sampai dengan akhir priode RPJMD yaitu tahun 2021.

Sampai dengan tahun 2020 panjang luasan jembatan yang dilakukan pemeliharaan sebesar 2.506,37 M^2 . Untuk realisasi tahun 2020 sebesar 41.07 M^2 , sedangkan target sampai dengan tahun 2021 sebesar 5.000 M^2 .

Tidak terpenuhinya capaian tersebut sebabkan faktor fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2020 adalah rehabilitasi dan pembangunan jalan. Namun sebenarnya terdapat 32 unit boxcover yang terbangun pada tahun 2020 guna meningkatkan akses masyarakat.

e) Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Bina Marga yang termanfaatkan

Persentase dokumen perencanaan teknis bina marga ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 80.00% dan dengan realisasi sebesar 103.33%. Berdasarkan pada persentase tersebut realisasi tahun 2020 untuk indikator persentase dokumen perencanaan teknis bina marga jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 23.33%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 32.00%.

Persentase capaian tersebut diperoleh dari jumlah dokumen perencanaan teknis bina marga yang termanfaatkan sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan

target jumlah dokumen perencanaan teknis binamarga yang termanfaatkan sampai dengan tahun 2021.

Jumlah dokumen perencanaan teknis binamarga yang disusun dan termanfaatkan pada tahun 2020 sebanyak 48 dokumen dari 40 dokumen yang ditargetkan. Sedangkan sampai dengan tahun 2020 jumlah dokumen yang tersusun dan termanfaatkan sebanyak 155 dokumen. Target jumlah dokumen yang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 150 dokumen perencanaan teknis binamarga yang termanfaatkan.

➤ **Penentuan Kinerja X2: Persentase Kinerja Bidang Sumber Daya Air**

Tabel 3.6 Indikator kinerja, untuk Esselon III Bidang Sumber Daya Air

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|--|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air | 83.51 | 90.78 | 83.51 | 100 | 0.00 |

Kinerja persentase pembangunan infrastruktur sumber daya air merupakan kinerja dari Esselon III, yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Air. Dari table 3.6, persentase pembangunan infrastruktur sumber daya air yang menjadi indikator kinerja Esselon III Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, ditargetkan 90.78 % dan terealisasi sebesar 83,51%. Dengan demikian kinerja pada indikator persentase pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun 2020 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari perubahan prioritas pembangunan terhadap kondisi keuangan daerah yang terdampak covid-19.

Hasil capaian kinerja Esselon IV Bidang Sumber Daya Air, karena kinerja Esselon II diperoleh dari akumulasi kinerja Esselon IV. Berikut adalah table kinerja Esselon IV Bidang Sumber Daya Air.

Tabel 3.7 Indikator kinerja, untuk Eselon IV Bidang Sumber Daya Air

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air | 121.84 | 94.25 | 132.18 | 100.00 | 10.34 |
| Persentase Jaringan Irigasi yang teraliri air | 48.16 | 81.56 | 48.16 | 100.00 | 0.00 |
| Persentase panjang Drainase Dalam Kondisi Baik | 118.86 | 100.00 | 118.86 | 100.00 | 0.00 |
| Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang terpelihara | 83.51 | 90.78 | 83.51 | 100.00 | 0.00 |

Kinerja Eselon IV pada Bidang Sumberdaya Air sebagaimana tabel 3.7, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang dimanfaatkan

Persentase dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang dimanfaatkan target 94.25% dan dengan realisasi sebesar 132.18%. Dari persentase tersebut, realisasi terhadap indikator kinerja persentase dokumen perencanaan teknis sumber daya air tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10.34% realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi tahun 2020 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019, yaitu sebesar 10.34%.

Indikator persentase dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang termanfaatkan tersebut dihitung dari jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang disusun dan termanfaatkan sampai dengan tahun 2019 dibagi jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang disusun dan termanfaatkan sampai tahun 2021.

Jumlah dokumen yang tersusun dan termanfaatkan sampai tahun 2020 sebanyak 115, sementara untuk tahun 2020 saja dokumen yang tersusun dan

termanfaatkan sebanyak 24 dokumen dari 7 dokumen yang ditargetkan. Sedangkan jumlah dokumen perencanaan teknis sumberdaya air yang menjadi target sampai dengan tahun 2021 sebanyak 87 dokumen.

Dari jumlah realisasi tersebut, terlihat bahwa realisasi dokumen perencanaan dokumen perencanaan teknis sumberdaya air yang dimanfaatkan sudah jauh melebihi target sampai dengan tahun 2021. Dokumen tersebut akan terus bertambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur sumberdaya air kedepan. Faktor ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan yang menjadi prioritas pada tahun 2020 terhadap dokumen perencanaan teknis dibidang sumber daya air. Hal ini juga disebabkan karena factor dampak covid-19 yang menjadikan perubahan strategi dan arah kebijakan pembangunan berubah, sehingga banyak terfokus sektor perencanaan dibidang kontruksinya.

b. Persentase jaringan irigasi yang terbangun yang teraliri air

Persentase jaringan irigasi yang teraliri air pada tahun 2020 ditargetkan 81.56% dan terealisasi sebesar 48.16%. Nilai realisasi ini merupakan nilai capaian realisasi tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 dan 2020 program kegiatan pendukung indikator jaringan irigasi yang teraliri air tidak dapat dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2020.

Faktor utama dari tidak masuknya program dan kegiatan pendukung indikator persentasi jaringan irigasi yang teraliri air tersebut adalah karena adanya perubahan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan upaya pemerintah dalam penanganan covid-19 sehingga terjadi pergeseran anggaran kepada upaya-upaya yang berdampak langsung terhadap penanganan covid-19 dan pembangunan-pembangunan yang bersifat strategis dan prioritas.

Namun demikian capaian persentasi diatas jika konversikan dalam panjang capaian irigasi yang telah dibangun maka panjang irigasi yang telah dibangun sampai tahun 2020 sepanjang 111.613 Meter dari yang ditargetkan. Sedangkan target sampai dengan tahun 2021 adalah sepanjang 231.751 Meter.

Artinya dengan demikian masih ada 120.138 Meter yang menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

c. Persentase panjang drainase yang terbangun dalam kondisi baik

Indikator ini ditargetkan 100% pada tahun 2019 dan realisasi 118,86%, dengan demikian capaian realisasi diharapkan pada tahun ini terpenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sepanjang 41.492 Meter. Namun capaian realisasi telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 18,86%. Capaian panjang drainase yang terbangun dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019 yaitu sepanjang 49.315,65 Meter. Sehingga pada tahun 2020 tidak lagi melakukan kegiatan yang mengarah kepada indikator tersebut.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari perhatian dan prioritas pembangunan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase panjang drainase yang terbangun dalam kondisi baik.

d. Persentase infrastruktur sumber daya air yang terpelihara.

Kinerja pada indikator ini ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 90,78 % dan terealisasi sebesar 83,51%. Sama dengan halnya pada indikator persentase panjang drainase yang terbangun dalam kondisi baik, pada indikator ini juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Factor utamanya juga sama dengan indikator-indikator lainnya yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

➤ **Penentuan Kinerja X3 = Persentase Kinerja Bidang Cipta karya dan Jasa Kontruksi**

Table 3.8 Indikator kinerja, untuk Esselon III Bidang Cipta karya dan Jasa Kontruksi

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Pembangunan Infrastruktur Cipta karya dan Jasa Kontruksi | 121.43 | 82.14 | 129.76 | 100 | 8.33 |

Kinerja persentase pembangunan infrastruktur cipta karya dan jasa kontruksi merupakan kinerja dari Esselon III, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi. Pada indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 ditargetkan sebesar 82.14% dan telah terealisasi sebesar 129.76%. Hasil capaian kinerja tersebut jauh dari target yang ditetapkan sebesar 47.62%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maka peningkatan capaian pada tahun 2020 meningkat sebesar 8.33%. Peningkatan tersebut disebabkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian dan prioritas pada program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung dan fasilitas sosial lainnya.

Kinerja tersebut diperoleh dari akumulasi kinerja Esselon IV. Berikut adalah tabel kinerja Esselon IV Bidang Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi.

Table 3.9 Indikator kinerja, untuk Esselon III Bidang Cipta karya dan Jasa Kontruksi

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|--|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Cipta Karya dan Jasa Kontruksi | 376 | 88.00 | 704 | 100 | 328.00 |
| Persentase Sarana dan Prasarana Gedung dan Fasilitas Sosial Lainnya | 121.43 | 82.14 | 129.76 | 100 | 8.33 |

Kinerja Esselon IV pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi sebagaimana tabel 3.9, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Cipta Karya dan Jasa Kontruksi

Indikator ini pada tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Esselon IV tahun 2020 ditargetkan sebesar 88 %. Realisasi capaian kinerja pada indikator ini tahun 2020 sebesar 704 % dari target yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan teknis cipta karya dan jasa kontruksi yang dimanfaatkan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 176 dokumen. Dari 25 dokumen yang menjadi target sampai tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 82 dokumen dari 3 dokumen yang ditargetkan di tahun 2020.

Kesalahan dalam menentukan angka target jumlah dokumen perencanaan teknis cipta karya dan jasa kontruksi pada awal penyusunan renstra menjadi faktor utama besarnya nilai capaian realisasi indikator tersebut. Faktor lainnya adalah meningkatnya jumlah kegiatan pembangunan pada bidang cipta karya dan jasa kontruksi sehingga secara linier mempengaruhi jumlah dokumen perencanaan yang disusun.

b. Persentase Sarana dan Prasarana Gedung dan Fasilitas Sosial Lainnya yang terbangun dalam kondisi baik.

Indikator kinerja ini ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 82.14% dan mampu terealisasi sebesar 129.76%. Hasil capaian tersebut jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 47.62% . Sedangkan jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8.33%.

Hasil capaian tersebut dihitung dari jumlah sarana dan prasana yang terbangun sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan jumlah target sampai dengan tahun 2021. Sampai dengan tahun 2020 jumlah sarana dan prasarana gedung dan fasilitas sosial yang terbangun sebanyak 109 Unit dari yang ditargetkan sampai tahun 2021 sebanyak 84 Unit, sementara untuk tahun 2020 dibangun sebanyak 6 unit.

Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan faktor utama yaitu, pandangan pemerintah daerah akan perlunya pembangunan sarana dan prasana gedung dan fasilitas sosial dengan didasarkan pada aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan ke pemerintah daerah. Dan tingginya nilai capaian tersebut terjadi

pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 hanya mengalami kenaikan persentase sebesar 8.33% dari tahun 2019.

Dari uraian capaian-capaian indikator kinerja baik indikator kinerja Esselon III dan Esselon IV sebagai mana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, menjadi bahan dasar utama dalam melakukan penilaian capaian kinerja Esselon II yang juga merupakan gambaran penilaian hasil kinerja OPD sebagai mana tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II tahun 2020. Hasil realisasi capaian kinerja atas PK selalu dilakukan evaluasi dan monitoring sebagaimana tertuang dalam Laporan Evaluasi dan Monitoring atas PK Tahun 2020 yang dilakukan setiap Triwulan.

Hasil capaian kinerja masing-masing tingkatan eselon sangat berpengaruh pada hasil capaian kinerja OPD. Dari Tabel 3.3 capaian realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada indikator persentase infrastruktur dasar pekerjaan umum tahun 2020 adalah sebesar 103.32 % dari yang ditargetkan sebesar 84.76%. Dengan demikian terjadi capaian yang melebihi dari target pada tahun 2020 yaitu sebesar 15.88%.

Maka jika hal ini diukur persentase capaian kinerja antara target 2020 dengan capaian realisasi 2020 maka nilai persentase kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada indikator persentase infrastruktur dasar pekerjaan umum sebesar 121.90%.

Faktor pendukung dari tingginya tingkat capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya perubahan arah kebijakan pembangunan dari kepala daerah, terutama pada program kegiatan yang berkaitan langsung dengan meningkatnya capaian kinerja X1 (Persentase Kinerja Bina Marga) dan X3 (Persentase Kinerja Bidang Cipta Karya dan Kontruksi). Sehingga dapat mendongrak capaian kinerja OPD. Pada X2 (Persentase Kinerja Bidang Sumber Daya Air), jika dilihat dari capaian kinerja Esselon IV, OPD telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Terlihat dari capaian kinerja persentase jalan dalam kondisi mantab yang mengalami realisasi capaian kinerja melebihi dari yang telah ditargetkan. Namun karena dipengaruhi capaian-capaian kinerja pada indikator lainnya yang tidak

- mencapai target yang diharapkan, sehingga mempengaruhi secara langsung terhadap capaian kinerja OPD.
2. Nilai capaian kinerja OPD juga sangat dipengaruhi dukungan anggaran yaitu sumber dana kegiatan yang bersumber dari dana DAK, sehingga terlaksananya kegiatan tersebut tidak terganggu dengan kondisi keuangan daerah. Serta perubahan kebijakan pembangunan jalan yang saat ini peningkatan jalan menjadi prioritas dan dilakukan dengan cara swakelola.
 3. Komitmen pimpinan OPD dan seluruh pemegang tanggung jawab terhadap upaya merealisasikan indikator persentase infrastruktur dasar pekerjaan umum sesuai dengan target yang diharapkan sebagaimana komitmen yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Sasaran II

Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan Air Bersih

1. Rasio luas cakupan pelayanan air bersih,

Rasio luas cakupan air bersih merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020, yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020. Komitmen terhadap tercapainya realisasi indikator ini tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II tahun 2020. Berikut adalah tabel 3.10 hasil capaian kinerja untuk indikator rasio luas cakupan pelayanan air bersih.

Tabel 3.10. Indikator kinerja, untuk sasaran meningkatnya luas cakupan pelayanan air bersih:

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0.66 | 0.6 | 2.14 | 0.72 | 1.48 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target capaian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.48 dari capaian tahun 2019. Formulasi untuk menghitung indikator rasio luas cakupan pelayanan air bersih adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{X1}{Y}$$

Keterangan :

X = Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih

X1= Jumlah SR yang terlayani

Y = Jumlah Kapasitas SR yang dibangun

Maka realisasi dari kinerja pada indikator Rasio Luas Cakupan Pelayanan Air Bersih diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

dimana,

X1 = Jumlah SR yang terlayani
= 6.764 Unit

Y = Jumlah Kapasitas SR yang dibangun yg menjadi target
= 3160 Unit

maka,
$$X = \frac{X1}{Y}$$

$$X = \frac{6.764}{3.160}$$

$$X = 2.14$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah yang terlayani sambungan layanan air sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6.764 rumah. Sedangkan jumlah layanan sambungan air yang menjadi target dari infrastruktur SPAM dan PAMSIMAS yang dibangun sampai tahun 2021 adalah sejumlah 3.160 Sambungan Rumah (SR).

Capaian ini sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD dikarenakan factor sudah semakin maksimalnya layanan dan operasional SPAM yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, begitu juga Program Pembangunan PAMSIMAS yang semakin merata diseluruh desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Indikator kinerja rasio luas cakupan air bersih sangat dipengaruhi oleh indikator kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III tahun 2020. Hasil pengukuran capain kinerja tersebut sebagaimana tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi kinerja indikator Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Air Bersih

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Air Bersih | 71.14 | 82.71 | 88.94 | 100 | 17.80 |

Kinerja pada indikator persentase pembangunan infrastruktur dan layanan air bersih merupakan indikator yang sangat mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja indikator rasio luas cakupan pelayanan air bersih. Semua keberhasilan kinerja tentu dipengaruhi dari keberhasilan dari indikator-indikator pendukung lainnya.

Persentase pembangunan infrastruktur dan layanan air bersih tahun 2020 ditargetkan sebesar 82.71 %, mampu terealisasi sebesar 88.94%. Terdapat 6.23% yang tidak mampu dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan indikator persentase pembangunan infrastruktur dan layanan air bersih juga dipengaruhi oleh keberhasilan indikator lain, yaitu indikator dari Perjanjian Kinerja Esselon IV. Berikut tabel indikator Esselon IV penunjang keberhasilan indikator tersebut.

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Esselon IV untuk air bersih

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Rumah yang terlayani sambungan rumah (Air) | 62.28 | 78.75 | 84.55 | 100 | 22.28 |
| Persentase Infrastruktur Air Bersih | 80.00 | 86.67 | 93.33 | 100 | 13.33 |

Dari tabel 3.12, ada 2 (dua) indikator sebagai tolak ukur keberhasilan program kegiatan yang telah direncanakan untuk dapat merealisasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Esseelon II yaitu rasio luas capaian pelayanan air bersih. Kedua indikator ini tidak dapat dipisahkan guna tersapainya target tersebut. Tabel 3.12 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase rumah yang terlayani sambungan rumah (Air)

Pada indikator ini, ditargetkan sebesar 78.75% dan terealisasi sebesar 84.55%. Terdapat 6.67% realisasi yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Faktor yang menjadikan capaian realisasi pada indikator ini sangat besar adalah telah maksimalnya oprasional SPAM dan Pembangunan PAMSIMAS yang ada dikabupaten Kepulauan Meranti.

b. Persentase infrastruktur air bersih yang terbangun dalam kondisi baik

Indikator ini ditargetkan sebesar 86.67% dan terealisasi sebesar sebesar 93.33%. Sebesar 6.67% nilai realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka sebesar 13.33% peningkatan capaian kinerja tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa besarnya perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur air bersih. Dengan demikian diharapkan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Meskipun belum secara optimal dalam merealisasikan pelayanan sambungan air bersih kepada masyarakat yang disebabkan belum beroprasionalnya infrastruktur air bersih yang dibangun secara maksimal, namun hal tersebut tidak menjadikan hasil kinerja pada indikator ini mengalami kegagalan. Dari seluruh indikator yang ditetapkan yang berkaitan dengan kinerja yang berkaitan dengan air bersih, telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung yang mempengaruhi tercapainya realisasi indikator kinerja pada indikator rasio luas cakupan pelayanan air bersih adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan ketersediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kebutuhan utama masyarakat selain infrastruktur lainnya. Hal ini menjadikan perhatian khusus pemerintah daerah sangat tinggi akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, terbukti ditunjukkan dari besarnya nilai anggaran yang disediakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
2. Tersedianya pembiayaan kegiatan yang bersumber dari dana DAK sangat mendorong pembangunan infrastruktur SPAM yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Komitmen pimpinan OPD dan seluruh pemegang tanggung jawab terhadap upaya merealisasikan indikator persentase infrastruktur dasar pekerjaan umum sesuai dengan target yang diharapkan.

Sasaran V

Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH)

2. Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni

Kebutuhan terhadap rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap manusia. Taraf hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih dalam kategori rendah dapat dilihat dari angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti yang menempati posisi terendah di Provinsi Riau.

Kondisi tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir memberikan solusi dan memastikan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Dengan kewajiban tersebut, maka persentase pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020. Komitmen dalam mewujudkan indikator tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II tahun 2020. Capaian pada indikator persentase penurunan rumah layak huni dapat dilihat dari Tabel 3.13, sebagai berikut:

Tabel 3.13. Indikator kinerja, untuk sasaran Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH)

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 37.69 | 79.70 | 73.35 | 100 | 35.66 |

Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni dihitung dengan formulasi berdasarkan SK IKU tahun 2020 yang ditetapkan, yaitu :

$$X = \frac{X1+X2}{y}$$

Keterangan :

X = Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni

X1 = Persentase jumlah rumah layak huni yang dibangun

X2 = Persentase infrastruktur penyehatan lingkungan kawasan permukiman yang dibangun

y = Jumlah Indikator yang di ukur (ada dua indikator)

Maka realisasi dari kinerja pada indikator Persentase pembangunan rumah layak huni diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

dimana,

X1 = Persentase Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibangun dalam kondisi baik

= 58.10%

X2 = Persentase infrastruktur penyehatan lingkungan kawasan permukiman yang dibangun

= 88.60%

maka,

$$X = \frac{X1 + X2}{y}$$

$$X = \frac{58.10\% + 88.60\%}{2}$$

$$X = 73.35\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa persentase pembangunan rumah layak huni sebesar 73.35%. Maka dengan demikian realisasi pencapaian kinerja terhadap indikator Persentase pembangunan rumah layak huni tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, yaitu 6.35% yang tidak dapat dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020.

Tidak tercapainya kinerja pada indikator persentase pembangunan rumah layak huni pada tahun 2020, disebabkan juga karena tidak tercapainya kinerja pada indikator-indikator pendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14 indikator Kinerja Bidang Perumahan Dan Kawasan permukiman

| Indikator Kinerja | Capaian | 2020 | Target | Target |
|-------------------|---------|------|--------|--------|
|-------------------|---------|------|--------|--------|

| | 2019 | Target | Realisasi | Akhir RPJMD (2021) | Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|-------------|---------------|------------------|---------------------------|---|
| Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman | 123.33 | 76.67 | 126.67 | 100 | 3.33 |
| Persentase penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 38.90 | 76.90 | 58.10 | 100 | 19.20 |
| Persentase Infrastruktur Penyehatan Lingkungan perumahan dan Kawasan Permukiman | 36.48 | 82.51 | 88.60 | 100 | 52.12 |

Dari tabel 3.14 diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Persentase dokumen perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman yang termanfaatkan.

Pada indikator ini ditargetkan, 76.67%, dan terealisasi sebesar 126.67%. Capain tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 capain tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,33%.

Indikator persentase dokumen perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman yang termanfaatkan dihitung dari jumlah dukumen perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman yang termanfaatkan samapai dengan tahun 2020 dibagi dengan jumlah target sampai dengan tahun 2021.

- b. Persentase Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibangun dalam kondisi baik.

Indikator ini ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 76,90% dan hanya mampu terealisasi sebesar 58,10%. Angka capaian tersebut jauh dari persentase yang telah ditetapkan, sebesar 18.80% kinerja pada indikator ini tidak mampu terealisasikan.

Tidak terealisainya capaian kinerja tersebut bukan merupakan kurangnya komitmen OPD terhadap Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor strategi dalam pengelolaan kebijakan dalam

menyikapi keadaan keuangan daerah. Tidak masuknya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan ini juga merupakan faktor utama tidak terealisasinya pembangunan Persentase Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibangun dalam kondisi baik tahun 2020. Dan yang menjadi factor utama terbesar adalah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan daerah menyikapi dampak Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Persentase Infrastruktur Penyehatan Lingkungan perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah dalam kategori layak huni juga ditinjau dari infrastruktur perumahan dan lingkungan perumahannya. Oleh karena itu ditetapkan indikator persentase infrastruktur penyehatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman menjadi bagian utama dalam menghitung indikator persentase pembangunan rumah layak huni.

Tareget jumlah infrastruktur penyehatan lingkungan kawasan permukiman yang dibangun sampai pada tahun 2020 sebanyak 1.382 unit atau sebesar 82.51%. Dan dari target yang telah ditetapkan direalisasikan sebesar 88.60%, pada tahun 2020 hanya sebanyak 873 unit infrastruktur penyehatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dibangun.

Capaian pada indikator ini sangat baik, karena telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini karena banyaknya infrastruktur penyehatan lingkungan yang dibangun. Pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh sumber anggaran DAK sehingga kegiatan tidak mengalami pergeseran anggaran ataupun rasionalisasi anggaran yang berarti.

Dari 2 (dua) indikator Persentase penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Persentase Infrastruktur Penyehatan Lingkungan perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 hanya indikator persentase penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja OPD yaitu persentase penurunan rumah tidak layak huni.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator persentase pembangunan rumah layak huni sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Jumlah ketersediaan anggaran yang ditetapkan untuk program/kegiatan yang mendukung indikator pembangunan rumah layak huni pada tahun 2020 sangat terbatas disebabkan oleh ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Hal ini tentu menjadikan strategi pembangunan dirubah arah kebijakannya menurut prioritas utama dengan berdasar kebutuhan masyarakat.
2. Tidak masuknya program kegiatan pembanguan rumah layak huni dalam struktur pembiayaan dari Dana Alokasi Kusus (DAK) membuat program kegiatan ini tidak dapat dianggarkan pelaksanaanya.

Sasaran IV Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

4.Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah

Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata tuang wilayah merupakan kewajiban bagi setiap pembanguan yang dilaksanakan.Hal ini tentu demi menjaga kaedah tata ruang sesuai dengan ketetapan yang ada. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, ketaatan pembanguan terhadap rencana tata ruang wilayah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020. Upaya mewujudkannya juga telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II tahun 200. Tabel 3.15 adalah capaian kinerja terhadap tetaatan pembanguan terhadap rencana tata ruang.

Tabel 3.15. Indikator kinerja, untuk sasaran Meningkatnya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rinciannya.

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|---|--------------|--------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 106.72 | 100.00 | 172.67 | 100 | 65.95 |

Berdasarkan IKU yang ditetapkan maka formulasi dalam menghitung persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah, yaitu :

$$X = \frac{X1 + X2}{y}$$

Keterangan :

X = Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah

X1 = Persentase pelayanan advice planing/ rekomendasi izin mendirikan bangunan

X2 = Persentase terhadap pelanggaran tata ruang yang tertangani

Y = Jumlah Indikator yang akan di ukur (ada dua indikator)

Maka realisasi dari kinerja pada indikator Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X1 &= \text{Persentase pelayanan advice planing/ rekomendasi izin} \\ &\quad \text{mendirikan bangunan} \\ &= 205.34\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X2 &= \text{Persentase terhadap pelanggaran tata ruang yang tertangani} \\ &= 140\% \end{aligned}$$

Maka,

$$X = \frac{X1 + X2}{y}$$

$$X = \frac{205.34\% + 140\%}{2}$$

$$X = 172.67\%$$

Pada indikator kinerja Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah tahun 2020, terjadi capaian kinerja yang sangat jauh dari yang menjadi target yaitu sebesar 72.67%. Tingginya tingkat capaian ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut:

1. Masifnya sosialisasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal pentingnya masyarakat melakukan pengurusan izin IMB, serta adanya kebijakan kemudahan dalam pengurusan IMB dimana petugas melakukan pelayanan pembayaran *dor to dor* bagi pemilik bangunan yang akan mengurus IBM dan diberikan layanan gratis dalam pembuatan gambar bangunan bagi pemilik bangunan ruko minimal tinggi bangunan tiga lantai.
2. Semakin sadarnya masyarakat terhadap ketaatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang taat terhadap rencana tata ruang, terbukti dari Pelayanan Advice Planing/Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu cara mengukur kinerja OPD adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat. Meskipun dengan demikian keberhasilan OPD tidak selalu berbanding dengan hasil dari tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan penilaian, karena penilaian bersifat subjektif dari responden. Tabel 3.16 adalah capaian dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.16. Indikator Kinerja, untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP

| Indikator Kinerja | Capaian 2019 | 2020 | | Target Akhir RPJMD (2021) | Target Peningkatan Capaian 2019 terhadap RPJMD 2021 |
|--|--------------|--------------|-----------|---------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | | |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | B (79.06) | A (81.26) | B (79.78) | A | 98.18 |

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 adalah B dengan nilai mutu pelayanan 79.78. Nilai tersebut diperoleh setelah dilakukan pengolahan data hasil questioner yang telah dilakukan survey berkala yaitu pertriwulan. Penyusunan dan pengolahan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dengan nilai pelayanan B tersebut, maka pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 belum maksimal sesuai dengan yang menjadi target. Maka perlu ditingkatkan pelayanan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 agar sesuai dengan yang menjadi target dan dapat memberi kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2020 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Realisasi anggaran sampai dengan 31 desember 2020 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.0 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100 | 1,343,085,140 | 100 | 1,250,981,640 | 100 | 93.14 | |
| 1.1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor Camat Pulau Merbau yang dibangun | Kegiatan | 1 | 75,000,000 | 1 | 74,400,000 | 100 | 99.20 | |
| 1.2 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Pengadaan Meleleur | Kegiatan | 1 | 71,000,000 | 1 | 71,000,000 | 100 | 100 | |
| 1.3 | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rentang waktu Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bulan | 12 | 87,065,140 | 12 | 72,666,640 | 100 | 83.46 | |
| 1.4 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Bulan | 12 | 9,000,000 | 12 | 9,000,000 | 100 | 100 | |
| 1.5 | Pembangunan Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor | Jumlah Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor yang dibangun | Unit | 4 | 1,101,020,000 | 4 | 1,023,915,000 | 92.87 | 93.00 | |
| 1.0 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dibangun | Persen | | 444,757,500 | | 444,757,500 | 100 | 100 | |
| 1.1 | Pembangunan Jembatan Sungai Tohor Kiri Kanan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | Panjang Pembangunan Jembatan Sungai Tohor Kiri Kanan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Dalam Kondisi Mantab | Meter | 66.9 | 444,757,500 | 66.9 | 444,757,500 | 100 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.0 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | Persentase infrastruktur Jalan dan Jembatan yang ditingkatkan | Persen | | 189,621,391,998 | | 113,619,735,486 | | 59.92 | |
| 1.1 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Jalan Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 287,547,000 | 0 | 263,412,000 | 0 | 91.61 | |
| 1.2 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Panjang Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Barati dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 131,450,000 | 0 | 110,004,740 | 0 | 83.69 | |
| 1.3 | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang | Panjang Jalan Kecamatan Rangsang dalam kondisi mantab | Meter | 295 | 26,707,381,582 | 276 | 6,758,903,806 | 93,56 | 25.31 | |
| 1.4 | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Barat | Panjang Jalan Kecamatan Rangsang Barat dalam kondisi mantab | Meter | 100 | 18,971,353,227 | 100 | 3,880,409,005 | 100 | 20.45 | |
| 1.5 | Peningkatan Jalan Kecamatan Merbau | panjang Jalan Jalan Kecamatan Merbau dalam kondisi mantab | Meter | 100 | 3,844,654,000 | 100 | 3,796,494,000 | 100 | 98.75 | |
| 1.6 | Peningkatan Jalan Kecamatan Pulau Merbau | panjang Jalan Kecamatan Pulau Merbau dalam kondisi mantab | Meter | 2.800 | 10,478,878,000 | 2.800 | 10,476,878,000 | 100 | 99.98 | |
| 1.7 | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Pesisir | Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Pesisir | Meter | 2,943 | 13,469,398,243 | 2,948 | 13,114,517,443 | 100 | 97,37 | |
| 1.8 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tasik Putri Puyu | Panjang Jalan Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam kondisi antab | Meter | 900 | 1,917,764,230 | 900 | 1,907,115,230 | 100 | 99.44 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|---|--|--------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.9 | Peningkatan Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | panjang Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur dalam kondisi mantab | Meter | 2,875 | 10,422,065,400 | 3,05 | 10,380,643,400 | 106 | 99.60 | |
| 1.10 | Peningkatan Jalan Parit Gantung Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) | panjang Jalan Parit Gantung Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) dalam kondisi mantab | Meter | 4,313 | 215,104,228 | 4,313 | 186,793,230 | 100 | 86.84 | |
| 1.11 | Peningkatan Jalan Utama Kampung Tengah Desa Sungai Gayung Kiri - Jalan Api Api Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang - Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) | panjang Jalan Utama Kampung Tengah Desa Sungai Gayung Kiri - Jalan Api Api Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang - Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) dalam kondisi mantab | Meter | 24 | 84,898,000 | 24 | 84,898,000 | 100 | 100 | |
| 1.12 | Peningkatan Jalan Pelabuhan Desa Topang Kecamatan Rangsang | Panjang Jalan Pelabuhan Desa Topang Kecamatan Rangsang dalam kondisi mantab | Meter | 2,805 | 73,304,000 | 2,805 | 73,304,000 | 100 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|---|--|----------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-----|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.13 | Peningkatan Jalan Pemuda Setia (DAK REGULER) | Panjang jalan Pembangunan Jembatan Kengkam (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Jembatan Kengkam Tahun 2017) dalam kondisi mantab | Meter | 174 | 3,131,328,539 | 174 | 3,131,328,539 | 100 | 100 | |
| 1.14 | Peningkatan Jalan Pusaka Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi | panjang Jalan Pusaka Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 10,010,000 | 0 | 10,010,000 | 0 | 100 | |
| 1.15 | Peningkatan Jalan Alai-Mekong (DAK IPD) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | Panjang Jalan Alai-Mekong (DAK IPD) (Penyelesaian Pembayaran 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 3,843,481,761 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.16 | Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | Jumlah Dokumen peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | Kegiatan | 1 | 2,646,240,300 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.17 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | Panjang jalan Jalan Lukun - Sei. Tohor (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 5,563,818,037 | 1 | 5,563,818,037 | 100 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|---|--|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-----|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.18 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | Panjang Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 22,833,253,465 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.19 | Peningkatan Jalan Sei. Nyiur - Perumbi | Panjang Jalan Sei. Nyiur – Perumbi dalam kondisi mantab | Dokumen | 1 | 2,017,063,071 | 1 | 2,017,063,071 | 100 | 100 | |
| 1.20 | Peningkatan Jalan Alai - Mekong (DAK IPD) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Alai - Mekong Tahun 2016) | Panjang Jalan Alai - Mekong (DAK IPD) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Alai - Mekong Tahun 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 152,778,680 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.21 | Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak Tahun 2016) | Panjang Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Kedabu - Tanjung Samak Tahun 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 147,593,160 | 1 | 0 | 100 | 0 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|--|---|----------|----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | |
| 1.22 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) | Panjang Jalan Lukun - Sei. Tohor (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) Timur dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 180,463,042 | 1 | 180,316,752 | 100 | 99.92 | |
| 1.23 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran Perencanaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) | Panjang Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran Perencanaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 49,990,000 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.24 | Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) | Panjang Jalan Lukun - Sei. Tohor (Tambahan DAK 2016) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Tahun 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 50,018,868 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.25 | Peningkatan Jalan Sumber Sari Gg. Swadaya Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Jalan Sumber Sari Gg. Swadaya Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 5,950,000 | 0 | 5,950,000 | 0 | 100 | |
| 1.26 | Peningkatan Jalan Manggis Gg. Kelapa Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Jalan Manggis Gg. Kelapa Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 9,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|--|--|----------|----------------|---------------|-------------------|----|--------------------------------------|----|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.29 | Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas Kayu Ara (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) | Panjang Jalan Pelabuhan Perangas Kayu Ara (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 8,172,192,116 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.30 | Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas - Kayu Ara (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas - Kayu Ara Tahun 2016) | Panjang Jalan Pelabuhan Perangas - Kayu Ara (DAK Reguler) (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas - Kayu Ara Tahun 2016) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 372,612,966 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.31 | Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran 2017) | Panjang Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran 2017) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 650,056,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.32 | Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak Tahun 2017) | Panjang Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak Tahun 2017) dalam | Kegiatan | 1 | 34,430,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|---|--|----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.35 | Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran Perencanaan Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak Tahun 2017) | Panjang Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak (Penyelesaian Pembayaran Perencanaan Pembangunan Boxculvert Jalan Tanjung Harapan - Lingkar Dorak Tahun 2017) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 49,940,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.36 | Peningkatan Jalan Banglas Gg Amal Kelurahan Selatpanjang Timur | Panjang Jalan Banglas Gg Amal Kelurahan Selatpanjang Timur dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 100 | |
| 1.37 | Peningkatan Jalan Banglas Gg. Kuantan Selatpanjang Timur | Panjang Jalan Banglas Gg. Kuantan Selatpanjang Timur dalam kondisi mantab | Meter | 441 | 4,850,000 | 441 | 4,850,000 | 100 | 100 | |
| 1.38 | Peningkatan Jalan Tanjung Samak - Repan (DAK Penugasan) | Panjang Jalan Tanjung Samak - Repan (DAK Penugasan) dalam kondisi mantab | Meter | 4.200 | 15,578,536,198 | 4.200 | 15,558,436,197 | 100 | 99.87 | |
| 1.39 | Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor (DAK Reguler) | Panjang Jalan Lukun - Sungai Tohor (DAK Reguler) dalam kondisi mantab | Meter | 7.800 | 25,810,243,000 | 7.800 | 24,840,130,354 | 100 | 96.24 | |
| 1.40 | Peningkatan Jalan Imam Bonjol Desa Citra Damai Menuju Desa Tanjung Medang | Panjang Jalan Imam Bonjol Desa Citra Damai Menuju Desa Tanjung Medang (DAK | Meter | 2.600 | 4,584,894,000 | 2.600 | 4,500,416,000 | 100 | 98.16 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|---|---|---------|----------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-----|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.41 | Perencanaan Teknis Jalan Sei. Tohor - Tanjung Sari | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Sei. Tohor - Tanjung Sari yang disusun | Dokumen | 1 | 92,936,000 | 1 | 92,936,000 | 100 | 100 | |
| 1.42 | Perencanaan Teknis Jalan Tanjung Sari - Tanjung Gadai | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Tanjung Sari - Tanjung Gadai yang disusun | Dokumen | 1 | 92,936,000 | 1 | 92,936,000 | 100 | 100 | |
| 1.43 | Survey Kondisi Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 39,578,000 | 1 | 39,578,000 | 100 | 100 | |
| 1.44 | Survey Kondisi Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 34,782,000 | 1 | 34,782,000 | 100 | 100 | |
| 1.45 | Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 34,782,000 | 1 | 34,782,000 | 100 | 100 | |
| 1.46 | Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Barat Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Barat Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 36,861,000 | 1 | 36,861,000 | 100 | 100 | |
| 1.47 | Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Pesisir Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kec. Rangsang Pesisir Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 34,716,000 | 1 | 34,716,000 | 100 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|---|--|---------|----------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-----|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.48 | Survey Kondisi Jalan Kec. Pulau Merbau Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kec. Pulau Merbau Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 35,112,000 | 1 | 35,112,000 | 100 | 100 | |
| 1.49 | Survey Kondisi Jalan Kec. Merbau Th. 2019 | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kec. Merbau Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 35,112,000 | 1 | 35,112,000 | 100 | 100 | |
| 1.50 | Survey Kondisi Jalan Kec. Tasik Putri Puyu Th. 2019 | Jumlah dokumen Survey Kondisi Jalan Kec. Tasik Putri Puyu Th. 2019 yang disusun | Dokumen | 1 | 34,386,000 | 1 | 34,386,000 | 100 | 100 | |
| 1.56 | Peningkatan Jalan Pramuka Gg. Babussalam Kelurahan Selatpanjang Timur | Panjang Jalan Pramuka Gg. Babussalam Kelurahan Selatpanjang Timur dalam kondisi mantab | Meter | 260 | 8,459,000 | 260 | 8,459,000 | 100 | 100 | |
| 1.57 | DED Peningkatan Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu | Jumlah Dokumen DED Peningkatan Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu yang disusun | Dokumen | 1 | 95,330,000 | 1 | 95,330,000 | 100 | 100 | |
| 1.59 | Peningkatan Jalan Budaya Gg. Sabar Kelurahan Selatpanjang Timur | Panjang Jalan Budaya Gg. Sabar Kelurahan Selatpanjang Timur dalam kondisi mantab | Meter | 0 | 7,942,000 | 0 | 7,942,000 | 0 | 100 | |
| 1.60 | Peningkatan Jalan Pramuka Gg. Laksmana Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang jalan Peningkatan Jalan Pramuka Gg. Laksmana Desa Banglas Kecamatan Tebing | Meter | 0 | 11,946,000 | 0 | 11,946,000 | 0 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|--|--|---------|----------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.61 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi yang disusun | Dokumen | 1 | 989,600,000 | 1 | 985,954,500 | 100 | 99.63 | |
| 1.62 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang disusun | Dokumen | 1 | 403,900,000 | 1 | 402,575,300 | 100 | 99.67 | |
| 1.64 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang disusun | Dokumen | 1 | 101,400,000 | 1 | 101,043,800 | 100 | 99.65 | |
| 1.65 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang yang disusun | Dokumen | 1 | 908,000,000 | 1 | 700,939,100 | 100 | 77.20 | |
| 1.66 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang Barat | Jumlah dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang Barat yang disusun | Dokumen | 1 | 303,100,000 | 1 | 302,107,300 | 100 | 99.67 | |
| 1.67 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang Pesisir | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Rangsang Pesisir yang disusun | Dokumen | 1 | 605,600,000 | 1 | 603,602,500 | 100 | 99.67 | |
| 1.68 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Merbau | jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Merbau yang disusun | Dokumen | 1 | 101,400,000 | 1 | 101,065,800 | 100 | 99.67 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------|--|---|----------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.69 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Pulau Merbau | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Pulau Merbau yang disusun | Meter | 1 | 303,100,000 | 1 | 302,106,200 | 100 | 99.67 | |
| 1.70 | Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tasik Putri Puyu | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Kabupaten di Kecamatan Tasik Putri Puyu yang disusun | Dokumen | 1 | 101,400,000 | 1 | 101,059,200 | 100 | 99.66 | |
| 1.72 | Peningkatan Jalan Perjuangan Kecamatan Tebing Tinggi (Penyelesaian Pembayaran 2019) | Panjang Jalan Perjuangan Kecamatan Tebing Tinggi (Penyelesaian Pembayaran 2019) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 421,153,358 | 1 | 421,153,358 | 100 | 100 | |
| 1.73 | Peningkatan Jalan M. Yakub - Insit Laut Kecamatan Tebing Tinggi Barat (Penyelesaian Pembayaran 2019) | Panjang Jalan M. Yakub - Insit Laut Kecamatan Tebing Tinggi Barat (Penyelesaian Pembayaran 2019) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 1,073,084,986 | 1 | 1,073,084,986 | 100 | 100 | |
| 1.74 | Peningkatan jalan H.Abd Kasan Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) (Penyelesaian Pembayaran 2019) | Panjang jalan H.Abd Kasan Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir (DAK AFIRMASI) (Penyelesaian Pembayaran 2019) dalam kondisi mantab | Kegiatan | 1 | 377,734,541 | 1 | 377,734,541 | 100 | 100 | |
| 1.75 | Survey Kondisi Jalan Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan Kabupaten Kepulauan Meranti yang isusun | Dokumen | 1 | 831,600,000 | 1 | 704,789,100 | 100 | 84.75 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.0 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatanyang terpelihara jalan dan jembatan | Persen | | 7,399,913,447 | | 7,360,640,038 | | 99.47 | |
| 1.1 | Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan se Kabupaten Kepulauan | panjang Jalan se Kabupaten Kepulauan | Meter | 122 | 5,699,913,447.22 | 13,376.10 | 5,694,853,308 | 10,964 | 99.91 | |
| 1.2 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanseKabupatenKepulauan | panjang Jalan jembatan se Kabupaten Kepulauan | Unit | 30 | 1,700,000,000 | 30 | 1,665,786,730 | 100 | 97.99 | |
| 1.0 | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Persentase saluran drainase yang dapat berfungsi dengan baik | Persen | | 179,513,000 | 83.31 | 179,135,000 | 98.01 | 99.79 | |
| 1.1 | Pembangunan Drainase Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Drainase Kecamatan Tebing Tinggi yang dibangun | Meter | 6,062 | 174,893,000 | 216 | 174,515,000 | 3.56 | 99.78 | |
| 1.2 | Pembangunan Drainase Jalan Bakti Gg. Kampas Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Drainase Jalan Bakti Gg. Kampas Kecamatan Tebing Tinggi yang dibangun | Meter | 113 | 4,620,000 | 113 | 4,620,000 | 100 | 100 | |
| 1.0 | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam kondisi baik | Persen | | 57,348,000 | | 57,222,000 | | 99.78 | |
| 1.1 | Pembangunan Turap di lingkungan Masjid Jannatunnaim Desa | Panjang Pembangunan Turap di lingkungan Masjid Jannatunnaim Desa | Meter | 123 | 7,348,000 | 125 | 7,348,000 | 102 | 100 | |
| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI | | TINGKAT | | KET |

| 1 | 2 | PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | 4 | KINERJA | | | | CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | 11 |
|------------|---|---|---------------|---------|--------------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | |
| 1.2 | Pembangunan Turap Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Pembangunan Turap Kecamatan Tebing Tinggi | Meter | 1,634 | 50,000,000 | 0 | 49,874,000 | 0 | 99.75 | |
| 1.0 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dalam kondisi baik | Persen | | 252,660,000 | | 187,330,000 | | 74.14 | |
| 1.1 | Pembangunan Jaringan Irigasi DIR Topang (DAK Penugasan) | Jumlah Dokumen Jasa Konsultasi Pembangunan Baru Daerah Irigasi Rawa (DIR) Lukun yang disusun | Dokumen | 1 | 6,380,000 | 1 | 6,380,000 | 100 | 100 | |
| 1.2 | Pembangunan Jaringan Irigasi DIR Mayang Sari (DAK Penugasan) | Jumlah Dokumen Pembangunan Jaringan Irigasi DIR Mayang Sari (DAK Penugasan) yang disusun | Dokumen | 1 | 6,380,000 | 1 | 6,380,000 | 100 | 100 | |
| 1.3 | Jasa Konsultasi Pembangunan Baru Daerah Irigasi Rawa (DIR) Lukun | Jumlah Dokumen Jasa Konsultasi Pembangunan Baru Daerah Irigasi Rawa (DIR) Lukun yang disusun | Dokumen | 2 | 89,705,000 | 2 | 89,705,000 | 100 | 100 | |
| 1.4 | Jasa Konsultasi Pembangunan Baru Daerah Irigasi Rawa (DIR) Teluk Buntal | Jumlah Dokumen Jasa Konsultasi Pembangunan Baru Daerah Irigasi Rawa (DIR) Teluk Buntal yang disusun | Dokumen | 2 | 84,865,000 | 2 | 84,865,000 | 100 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|---|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.5 | Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Mayang Sari Kecamatan Merbau | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Mayang Sari Kecamatan Merbau yang disusun | Dokumen | 1 | 65,330,000 | 1 | 0 | 76.54 | 0 | |
| 1.0 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan | Persentase sarana dan prasarana keagamaan yang Dibangun | Persen | 64.29 | 977,111,480 | 121.43 | 866,888,000 | 188.8 | 88.72 | |
| 1.1 | Pembangunan Astaka MTQ | Jumlah Astaka MTQ yang dibangun | Dokumen | 1 | 26,476,480 | 1 | 26,400,000 | 100 | 99.71 | |
| 1.2 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang Barat | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang Barat | Dokumen | 10 | 98,020,000 | 10 | 90,580,000 | 93.88 | 92.41 | |
| 1.3 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan | Dokumen | 8 | 91,545,000 | 8 | 89,468,000 | 97.73 | 99.52 | |
| 1.4 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang Pesisir | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Rangsang Pesisir | Dokumen | 5 | 46,120,000 | 5 | 44,375,000 | 99.05 | 96.22 | |
| 1.5 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Pulau Merbau | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Pulau Merbau | Dokumen | 8 | 68,960,000 | 8 | 67,620,000 | 98.40 | 98.06 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|--|---|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.6 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Merbau | jumlah pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Merbau | Dokumen | 7 | 68,600.000 | 7 | 67,537,000 | 100 | 98.45 | |
| 1.7 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi | Dokumen | 14 | 186,614,000 | 14 | 109,977,000 | 62.49 | 58.93 | |
| 1.8 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi Timur | Dokumen | 3 | 87,246,000 | 3 | 84,950,000 | 100 | 97.37 | |
| 1.9 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Unit | 1 | 274,410,000 | 1 | 258,476,000 | 97.60 | 94.19 | |
| 1.10 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tasik Putri Puyu | Jumlah Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kecamatan Tasik Putri Puyu | Dokumen | 4 | 29,120,000 | 4 | 27,505,000 | 98.45 | 94.45 | |
| 1.0 | Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air | Persentase Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang terbangun | Persen | 100 | 976,578,900 | 85.71 | 976,578,900 | 85.71 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.1 | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Padang (DR) | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Padang (DR) | Kegiatan | 1 | 293,218,200 | 0 | 293,218,200 | 100 | 100 | |
| 1.2 | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Rangsang (DR) | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Rangsang (DR) | Dokumen | 1 | 390,142,500 | 1 | 390,140,500 | 100 | 97.42 | |
| 1.3 | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Merbau (DR) | Jasa Konsultasi Rehabilitasi Mangrove dengan Pembangunan Batu Bronjong di Pulau Merbau (DR) | Dokumen | 1 | 293,218,200 | 1 | 293,218,200 | 100 | 100 | |
| 1.0 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang terbangun | Persen | | 3,117,830,000 | | 2,467,789,263 | | 79.15 | |
| 1.1 | Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Bungur | Rentang Waktu Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD | Bulan | 12 | 67,620,000 | 12 | 60,170,000 | 88.98 | 88.98 | |
| 1.2 | Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Sungai Tohor | Rentang Waktu Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD | Bulan | 12 | 153,445,000 | 12 | 97,550,000 | 69.83 | 63.57 | |
| 1.3 | Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Tanjung Samak | Rentang Waktu Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD | Bulan | 12 | 463,070,000 | 12 | 367,716,000 | 87.00 | 79.41 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|-----|--|--|--------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | |
| 1.4 | Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Teluk Belitung | Rentang Waktu Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD | Bulan | 12 | 160,770,000 | 12 | 70,020,514 | 64.92 | 43.55 | |
| 1.5 | Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Tanah Merah | Rentang waktu Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Logistik UPTD SPAM Tanah Merah | Bulan | 12 | 54,800,000 | 12 | 40,900,000 | 95.99 | 74.64 | |
| 1.6 | Pembangunan IPA Kapasitas 5L/d SPAM Gemala Sari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | Jumlah Pembangunan IPA Kapasitas 5L/d SPAM Gemala Sari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | SR | 50 | 154,190,000 | 45 | 15,740,000 | 10.89 | 10.21 | |
| 1.7 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanah Merah Kawasan Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanah Merah Kawasan Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | SR | 50 | 1,007,590,000 | 50 | 896,358,329 | 99.18 | 88.96 | |
| 1.8 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bungur Kawasan Desa Bungur Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bungur Kawasan Desa Bungur Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti (DAK Afirmasi) | SR | 23 | 509,425,000 | 23 | 462,817,920 | 100 | 90.85 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|--|--|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.11 | Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Pulau Merbau | Jumlah Dokumen Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Pulau Merbau yang disusun | Dokumen | 2 | 81,380,000 | 2 | 80,564,000 | 100 | 99.00 | |
| 1.12 | Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Pulau Tebing Tinggi | Jumlah Dokumen Perencanaan/DED Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Pulau Tebing Tinggi yang disusun | Dokumen | 2 | 72,500,000 | 2 | 70,850,000 | 100 | 97.72 | |
| 1.13 | Pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) SPAM Gemala Sari Kecamatan Rangsang | Jumlah Dokumen Pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) SPAM Gemala Sari Kecamatan Rangsang yang disusun | Dokumen | 1 | 39,990,000 | 1 | 39,570,000 | 100 | 98.95 | |
| 1.0 | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | Persentase pembangunan infrastruktur perdesaan yang terbangun | Persen | | 4,111,526,000 | | 3,616,269,453 | | 87.95 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | |
| 1.1 | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Dana Pendamping APBN | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Dana Pendamping APBN | Desa | 4 | 57,453,000 | 0 | 25,213,000 | 0 | 43.88 | |
| 1.2 | Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca Pamsimas Kategori Hijau) (DAK Penugasan) | Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun (untuk Desa Pasca Pamsimas Kategori Hijau) (DAK Penugasan) | Unit | 570 | 4,054,073,000 | 570 | 3,591,056,453 | 100 | 88.58 | |
| 1.0 | Program Pengendalian Banjir | | Persen | | 193,600,000 | | 193,160,000 | | 99.77 | |
| 1.1 | Pembangunan Pengendali Banjir Kecamatan Tebing Tinggi | Panjang Pembangunan Pengendali Banjir Kecamatan Tebing Tinggi yang dibangun | Meter | 6,288 | 193,600,000 | 0 | 193,160,000 | 0 | 99.77 | |
| 1.0 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Kawasan Perumahan yang terbangun | Persen | | 5,557,532,400 | | 5,426,824,400 | | 97.65 | |
| 1.1 | Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Tebing Tinggi | Jumlah Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Tebing Tinggi | Kegiatan | 1 | 130,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Jumlah Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Tebing Tinggi Barat | Dokumen | 1 | 756 | 1 | 756 | 100 | 100 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.3 | Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya, Termasuk Upah Tukang (DAK Afirmasi) | Jumlah Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya, Termasuk Upah Tukang (DAK Afirmasi) | Unit | 1 | 3,178,222,400 | 1 | 3,178,222,400 | 100 | 100 | |
| 1.4 | Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya, Termasuk Upah Tukang (DAK Afirmasi) | Jumlah Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya, Termasuk Upah Tukang (DAK Afirmasi) | Dokumen | 1 | 2,248,554,000 | 1 | 2,247,854,000 | 100 | 99.97 | |
| 1.0 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Persentase Sarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan yang terbangun | Persen | | 9,606,645,027 | | 9,600,449,800 | | 99.94 | |
| 1.1 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Afirmasi) | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Afirmasi) | Unit | 255 | 1,506,210,000 | 255 | 1,505,145,000 | 100 | 99.93 | |
| 1.2 | Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK (DAK Afirmasi) | Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK (DAK Afirmasi) | Unit | 5 | 2,208,345,000 | 5 | 2,207,050,000 | 100 | 99.94 | |
| 1.3 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Penugasan) | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Penugasan) | Unit | 114 | 721,695,032 | 114 | 720,484,900 | 100 | 99.83 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|--|---|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.4 | Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) (DAK Penugasan) | Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) (DAK Penugasan) | Unit | 40 | 2,498,150,000 | 40 | 2,496,909,900 | 100 | 99.95 | |
| 1.5 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAKReguler) | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Reguler) | Unit | 459 | 2,672,244,995 | 459 | 2,670,860,000 | 100 | 99.95 | |
| 1.0 | Program kegiatan pemberdayaan komunitas | Persentase kegiatan pemberdayaan komunitas | Persen | | 200,000,000 | | 195,431,038 | | 97.72 | |
| 1.1 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) | Dokumen | 1 | 200,000,000 | 1 | 195,431,038 | 100 | 97.72 | |
| 1.0 | Program Pemanfaatan Ruang | Persentase Data Pemanfaatan Ruang Wilayah | Persen | | 458,289,000 | | 376,717,000 | | 82.20 | |
| 1.1 | Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang | Agar tersebarnya informasi mengenai kebijakan penataanruang | Kegiatan | 1 | 266,509,000 | 1 | 258,959,000 | 100 | 97.17 | |
| 1.2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten | Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | Kegiatan | 1 | 62,700,000 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 1.3 | Pendataan Bangunan Gedung di Kab. Kep. Meranti | Tersedianya Data Bangunan Gedung di Kab. Kep. Meranti | Dokumen | 1 | 129,080,000 | 1 | 117,758,000 | 100 | 91.23 | |
| 1.0 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Data pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | | 64,200,000 | | 52,120,000 | | 81.18 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.1 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan Ruang | Meningkatnya ketaatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya | Kegiatan | 1 | 64,200,000 | 1 | 52,120,000 | 100 | 81.18 | |
| 1.0 | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase Data Pemanfaatan Ruang Wilayah | Persen | | 76,646,500 | | 76,646,500 | | 100 | |
| 1.1 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW | Jumlah Dokumen Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW yang disusun | Dokumen | 1 | 76,646,500 | 1 | 76,646,500 | 100 | 100 | |
| 1.0 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Ketersediaan Perangkat Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | | 3,513,986,523 | | 3,161,059,051 | | 89.96 | |
| 1.1 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Rentang Waktu Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | 784,751,523 | 12 | 782,752,706 | 97.45 | 99.75 | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Jumlah Honorarium Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Bulan | 12 | 2,332,800,000 | 12 | 2,070,000,000 | 100 | 88.73 | |
| 1.3 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Rentang Waktu Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | Bulan | 12 | 396,435,000 | 12 | 308,306,345 | 100 | 77.77 | |
| 1.0 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang tersusun | Persen | | 100,000,000 | | 99,886,200 | | 99.89 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Kegiatan (Output) | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | | KET |
|------------|---|--|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Rp | Nilai | Rp | Nilai | Rp | 11 |
| 1.1 | Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | Dokumen | 1 | 100,000,000 | 1 | 99,886,200 | 100 | 99.89 | |
| 1.0 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun | Persen | | 250,000,000 | | 249,849,000 | | 99.94 | |
| 1.1 | Pendataan Kebijakan Dinas PUPRKP Kabupaten Kepulauan Meranti | Jumlah dokumen Pendataan Kebijakan Dinas PUPRKP Kabupaten Kepulauan Meranti Yang disusun | Dokumen | 1 | 250,000,000 | 1 | 249,849,000 | 100 | 99.94 | |

Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, sebesar **Rp. 256.086.383.830** tetapi setelah dilakukan perubahan pada APBD Perubahan menjadi, **Rp228.502.614.915** dianggarkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2020 dan telah terealisasi sebesar **Rp. 150.471.110.269** atau **65.85%**.

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **65.85%**, tidak dapat mencapai **100%**, terjadi silfa anggaran yaitu disebabkan beberapa faktor yaitu salah satunya perbedaan nilai kontrak dengan nilai DPA dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dibayarkan realisasi keuangannya.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

| Indikator Sasaran | Realisasi Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) | Efektifitas Kinerja (%) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 103.32 | 62.10 | 41.22 | 166.38 |
| Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 214.05 | 84.60 | 129.45 | 253.01 |
| Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 73.35 | 99.20 | -25.85 | 73.94 |
| Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah | 172.67 | 84.40 | 88.27 | 204.59 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79.78 | 91.40 | -11.62 | 87.29 |

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2020

1. Gambaran Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah proses produksi, yang merupakan kendala utama pada tahap pelaksanaan kegiatan dalam proses tersebut adalah waktu, biaya dan mutu. Disamping profesionalitas dari penyedia jasa yang terkait satu dengan lainnya sehingga komponen waktu, biaya dan mutu perlu dikelola secara menyeluruh dan lebih terpadu. Pencapaian persyaratan mutu sesuai spesifikasi pada tingkatan memuaskan pengguna jasa khususnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya menjadi hal yang terpenting, karena sesudah suatu proyek dilaksanakan, penilaian biasanya ditekankan pada masalah kualitas (mutu), penampakan penyelesaian akhir suatu pekerjaan (Finishing) yang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Faktor lain yang menjadi permasalahan adalah perubahan arah kebijakan yang dilakukan atas dasar pertimbangan prioritas pembangunan dan faktor pertimbangan keuangan daerah. Hal ini juga akan berdampak pada penerimaan mutu dan kualitas pekerjaan.

Penerimaan kualitas pekerjaan pada umumnya didasarkan atas pemenuhan persyaratan sesuai spesifikasi. Dalam satu dan lain hal, kualitas pekerjaan dapat tidak memenuhi syarat yang disebabkan oleh :

- ***Kendala Waktu***

Penetapan jadwal pelaksanaan yang terlalu singkat menyebabkan setiap kegiatan (terutama kegiatan–kegiatan pada lintasan kritis) dilaksanakan tergesa–gesa, bahkan pada jam–jam lembur dimana kondisi akan tidak menguntungkan (malam hari), kondisi fisik pada pekerja sudah pada lelah, faktor cuaca juga sangat menentukan dalam mencapai pekerjaan yang berkualitas.

- ***Kendala Biaya***

Adanya kebijakan pemangkasan anggaran atau rasionalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan terlaksananya program kegiatan yang telah ditargetkan. Serta nilai kontrak (*Lump Sum Contract*) yang terlalu rendah menyebabkan penyedia jasa harus mengadakan penghematan dalam penggunaan material maupun upah. Lebih dari itu, dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada kondisi keuangan daerah, dimana daerah harus melakukan upaya-upaya pengurangan dampak dari

Covid-19, sehingga terjadi perubahan-perubahan kebijakan terhadap belanja daerah. Perubahan belanja daerah tersebut mengakibatkan perubahan pada arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

- ***Kendala Material***

Sebaik apapun proses pelaksanaan, dari bahan baku yang buruk tidak akan menghasilkan produk yang bermutu baik. Material pembangunan umumnya didapatkan dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini menyebabkan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.

- ***Kendala Spesifikasi***

Penetapan Spesifikasi mutu yang terlampau tinggi yang sulit dicapai dengan keterampilan dan peralatan yang ada.

- ***Kendala Sumber Daya Manusia***

Pengguna dan penyedia jasa seharusnya menguasai dan mengerti aspek-aspek teknis pelaksanaan, sehingga tidak semata hanya memikirkan keuntungan Pribadi (*Profit Oriented*) tetapi juga harus menjiwai dan mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada, juga harus mempunyai rasa memiliki terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan.

- ***Kendala Mutu***

Kualitas mutu sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja sebuah instansi. Kinerja dari sebuah OPD dihitung dari mutu yang dihasilkan. Apabila suatu pekerjaan, mutu tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka kinerja dari sebuah indikator tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan capaian indikator tersebut. Kendala mutu ini dapat disebabkan karena faktor material, penyedia barang dan jasa maupun sumber daya manusia OPD. Apapun faktornya, mutu sangat berpengaruh terhadap penilaian capaian kinerja dari sebuah indikator.

2. Strategi Pemecahan Masalah

Program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 disusun perencanaannya berdasarkan data-data dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa atau Kelurahan dan dilanjutkan ke Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan sebelum dirumuskan ketingkat Kabupaten dan Provinsi.

Disamping itu ada kegiatan yang tidak melalui musrenbang yaitu kegiatan dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota Dewan. Kendala yang selalu

ditemui dilapangan bahwa usulan kegiatan ini banyak terdapat kelemahannya karena perencanaannya tidak melalui survey yang akurat sehingga banyak pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sesuai jadwal yang ditentukan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti selalu memberikan teguran-teguran dan rapat bersama dengan para kontraktor untuk mengatasi apa-apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diatasi dengan baik, diberikan pembinaan-pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, hal seperti ini hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi dilakukan (*Pre Construction Meeting*).

Partisipasi masyarakat diperlukan juga dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga sangat diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pekerjaan tersebut bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pemberian Sertifikat dari Pemerintah bagi rekanan yang mempunyai kuantitas dan kualitas kerja yang bagus dalam memenuhi target “tepat waktu, mutu dan laku” sangat diperlukan, guna memacu semangat para rekanan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Selanjutnya Riset dan *Quantity Control* (QC) dilapangan sangat kurang sehingga diperlukan laboratorium yang memadai untuk mendukung penelitian dan mengontrol kualitas pekerjaan dilapangan, serta konsultan pengawas yang tepat untuk dapat secara continue memantau langsung kegiatan dilapangan.

Manajemen proyek harus dapat digunakan secara efektif untuk membangun, mendukung, dan menanggapi sistem kualitas suatu pelaksanaan proyek untuk menjamin keselamatan dan toleransi terhadap kerusakan konstruksi, maka sangat diperlukan adanya *Total Quality Management*(TQM). Ada 4 elemen dasar untuk mendapatkan *Total Quality Management*(TQM) ; Komitmen manajemen, kerja tim, teknis dan sistem mutu.

Strategi lain yang diterapkan adalah dengan mengidentifikasi seluruh potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi dalam menghambat atau bahkan tidak tercapainya suatu tujuan OPD. Strategi tersebut dipetakan berdasarkan kegiatan dan potensi risikonya, serta diberikan bobot risiko dan dampak yang timbulkan dari kemungkinan-kemungkinan

tersebut dalam suatu pencapaian tujuan OPD. Strategi tersebut bisa disebut dengan Manajemen Risiko. Menyusun dan menerapkan management risiko baik tingkat kegiatan maupun OPD merupakan amanah dari Perbub. Kabupaten Kepulauan Meranti No. 52 tahun 2017. Dengan menjalankan strategi penanganan dari potensi risiko dan dampak yang telah dipetakan, maka peluang untuk gagal tercapainya tujuan OPD dapat diminimalisir.

Selain dari semua hal diatas, komitmen dan kepatuhan azaz dari semua pemangku kepentingan merupakan factor utama tercapainya sebuah tujuan OPD. Serta dukungan anggaran dan penggunaan anggaran yang tetap guna dan tepat sasaran juga hal yang tak kalah penting. Peran serta masyarakat juga bagian yang tak terpisahkan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Sedangkan strategi dan upaya merealisasikan target kinerja yang diakibatkan oleh dampak Covid-19, Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancam Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat sejauh mana keberhasilan/kegagalan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 5 (lima) indikator capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019. Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600//PUPRPKP/KPTS/I/2020/035 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.
2. Dari 5 (lima) Indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu Indikator Kinerja Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni dan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Dari sisi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada APBD murni anggaran sebesar Rp. 256.086.383.830 sedangkan pada APBD-P sebesar Rp. 228.502.614.915. Dengan serapan atau realisasi anggaran sebesar Rp. 150.471.110.269 atau sebesar 65.85%.
4. Realisasi fisik pekerjaan atau kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 yaitu sebesar 97.71%.
5. Faktor-faktor perubahan arah kebijakan dan kondisi keuangan daerah menjadi faktor utama yang mempengaruhi realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020.

6. Nilai efisiensi antara realisasi terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi keuangan, dari 5 indikator yang ditetapkan, terlihat bahwa efektifitas kinerja 3 indikator sangat baik sekali. 2 indikator dalam kategori baik meskipun tidak mencapai 100%, dimana persentase penyerapan anggarannya lebih besar dari persentase kinerja yang direalisasikan.

Jika dilihat dari perbandingan realisasi fisik dan keuangan yang tingkat capaiannya sangat tinggi persentase realisasi fisik pada tahun 2020. Sedangkan untuk realisasi keuangan serapan dan realisainya rendah. Hal ini lebih disebabkan oleh perubahan struktur belanja sehingga terjadi pergeseran anggaran dimana anggaran tahun 2020 lebih diprioritaskan kepada penanggulangan dampak Covid-19. Sehingga strategi yang dilakukan adalah tetap menyelesaikan konstruksi fisik pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun untuk keuangan atau pembayaran pekerjaan dilakukan kebijakan tunda bayar. Nilai tunda bayar terhadap pekerjaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 35.669.993.447

Oleh karena itu secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang menjadi target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah untuk kinerja tahun 2020. Namun demikian perlu melakukan evaluasi program dan kegiatan serta target kinerja berdasarkan strategi dan kebijakan baru berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan pemerintah daerah dan diselaraskan dengan target kinerja yang diharapkan oleh pemerintah daerah agar tingkat capaian kinerja dan efektifitas serta efisiensi dapat ditingkatkan.

Proses perencanaan yang matang dan terukur diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kedepan. Faktor yang lebih penting dari hal itu semua adalah komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selatpanjang, 10 Februari 2020

**Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) of Selatpanjang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SELATPANJANG' and 'DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'ROSDANER, S.Pd' and the NIP number '19610311 198804 1 001' are printed.

ROSDANER, S.Pd
NIP. 19610311 198804 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU HANIFAH, M.Pd**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Irwan, M.Si**
Jabatan : **Bupati Kepulauan Meranti**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 03 November 2020

Pihak Kedua

**BUPATI
KEPULAUAN MERANTI**

Pihak Pertama

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) |
|-----|---|---|------------|
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum | 84.76 |
| 2 | Meningkatnya Luas Cakupan Pelayanan air bersih | Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih | 0,60 |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni | 79.70 |
| 4 | Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 100.00 |
| 5 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | A |

| NO. | PROGRAM KEGIATAN | PAGU DANA | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 3.513.986.523,00 | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 1.343.085.140,00 | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp - | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 100.000.000,00 | |
| 5 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp 179.513.000,00 | |
| 6 | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Rp 57.348.000,00 | |
| 7 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp 7.399.913.447,22 | |
| 8 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Rp 252.660.000,00 | |
| 9 | Program Pengendalian Banjir | Rp 193.600.000,00 | |
| 10 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp 3.117.830.000,00 | |
| 11 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Rp 4.111.526.000,00 | |
| 12 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | Rp 189.621.391.998,00 | |
| 13 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp 444.757.500,00 | |
| 14 | Program Sarana dan Prasarana Keagamaan | Rp 977.111.480,00 | |

| NO. | PROGRAM KEGIATAN | PAGU DANA | KETERANGAN |
|------------------------|---|---------------------------|------------|
| 15 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp 76.646.500,00 | |
| 16 | Program Pemanfaatan Ruang | Rp 458.289.000,00 | |
| 17 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp 64.200.000,00 | |
| 18 | Program Pengembangan Perumahan | Rp 5.557.532.400,00 | |
| 19 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Rp 9.606.645.027,00 | |
| 20 | Program Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Permukiman | Rp 200.000.000,00 | |
| 21 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp - | |
| 22 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 250.000.000,00 | |
| 23 | Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air | Rp 976.578.900,00 | |
| TOTAL PAGU DANA | | Rp 228.502.614.915 | |

Selatpanjang, 03 November 2020

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



ABU HANIFAH, M.Pd
NIP. 19681214198908 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Jalan Dorak - Telp/Fax (0763-434706)

SELATPANJANG - 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Nomor : 600/PUPRKP/KPTS/I/2020/035**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 , tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Lapran Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 09);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 09);
-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal : 15 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



H. HERMAN, SE, MT
NIP. 19651231 199503 1 014

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
: 600 / PUPRPKP/KPTS/I/2020/035
: 15 Januari 2020

Nomor
Tanggal

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | KETERANGAN |
|----|--|--|--------|--|--|--|--|
| | | | | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | |
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti | Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Meranti | % | Infrastruktur merupakan organ penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah karena Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum juga merupakan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah | $X = \frac{X1+X2+X3}{y}$ <p>Keterangan: X = Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti X1 = Persentase Kinerja Bidang Kebencanaan X2 = Persentase Kinerja Bidang Sumber Daya Air X3 = Persentase Kinerja Bidang Cipta Karya dan Konstruksi Y = Jumlah Bidang yang membangun Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum</p> | <ol style="list-style-type: none"> Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> Panjang jalan dalam kondisi mantab, jembatan yang terbangun dalam kondisi baik. Panjang Drainase yang terbangun dalam kondisi baik Panjang Saluran Irigasi yang terabai Air Jumlah gedung/bangunan yang terbangun dan fasilitas sosial lainnya yang terbangun |
| 2 | Meningkatnya Laju Cakupan Pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti | Rasio Laju Cakupan Pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti | % | Pada prosipnya analisis risiko adalah untuk mengedukasi perilaku terhadap kinerja Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelayanan air bersih dan potensi atau kemajuan kinerja aparatur | $X = \frac{X1}{y}$ <p>Keterangan: X = Rasio Laju Cakupan Pelayanan air bersih X1 = Jumlah SR yang terlayani Y = Jumlah Target Kapasitas SR yang dibangun</p> | Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> Rumah Yang Dekat Dengan Lokasi Di Bangunnya SPAM Daerah yang memiliki kesulitan debit air bersih Masyarakat yang tidak mampu |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) | Persentase Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni | % | Pemerintah daerah konsentrasi terhadap pengurangan angka kemiskinan, salah satu tolak ukurnya adalah dengan memperbaiki rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Meranti | $X = \frac{X1+X2}{y}$ <p>Keterangan: X = Persentase Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni X1 = Persentase jumlah rumah layak huni yang dibangun X2 = Persentase infrastruktur penyehatan lingkungan kawasan pemukiman yang dibangun y = Jumlah Indikator yang akan diukur (ada dua indikator)</p> | Bidang Pemukiman dan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat yang tergolong tidak mampu, tercatat pada Data Sosial sebagai instansi yang melakukan pendataan masyarakat tidak mampu di suatu daerah Melihat Kualitas rumah Jumlah KK dalam satu rumah Akses sanitasi Dan lain sebagainya |
| 4 | Meningkatnya Ketepatan Penempatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya | Persentase Ketepatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | % | Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten | $X = \frac{X1+X2}{y}$ <p>Keterangan: X = Persentase Ketepatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah X1 = Persentase pelayanan advice planning/rekomendasi izin mendirikan bangunan X2 = Persentase terhadap pelanggaran tata ruang yang tertangani Y = Jumlah Indikator yang akan diukur (ada dua indikator)</p> | Bidang Tata Ruang | Bangunan yang ber IMB |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------|--|
| 5 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PUPRP PUPRKP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | Peningkatan kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat | $IKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi Peranan}}{\text{Total Dasar yang teres}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | Bintang Sekeluaris | Jika Telah Terpenuhi 14 Unsur Pelayanan yaitu : 1. Prosedur Pelayanan 2. Peryataan Pelayanan 3. Kejelasan Perogan Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapat Pelayanan 9. Kesopanan dan Kemah An Petugas 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Kenyamanan Pelayanan |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|--------------------|--|

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



H. HERMAN, SE, MT
Nip.19651231 199503 1 014